



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Kabupaten Cirebon layaknya kabupaten/kota lainnya terutama di Jawa Barat, hingga saat ini masih dihadapkan pada tantangan pembangunan yang tidak sedikit. Hal ini tampak dari gambaran umum dan keuangan daerah yang tersaji pada bab sebelumnya yang menampilkan data empiris, dimana tampak bahwa Kabupaten Cirebon masih menyimpan persoalan serius, khususnya terkait dengan persoalan lingkungan, sosial dan ekonomi yang menjadi pilar utama tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's) di daerah.

Pada bab ini, akan diurai secara sistematis beberapa isu sektoral yang masih menjadi tantangan penting dalam percepatan pencapaian SDG's di Kabupaten Cirebon, yaitu :

a. Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial

Kabupaten Cirebon masih dihadapkan pada persoalan masih tingginya angka kemiskinan, di atas rata-rata angka kemiskinan Provinsi Jawa Barat (7,45%:2018) dan Nasional (9,66%:2018) Kabupaten Cirebon mencapai 10,70% pada Tahun 2018. Penyebabnya beragam, mulai dari terbatasnya lapangan kerja dan belum banyaknya lapangan kerja baru di bidang kewirausahaan, hingga kontribusi sektor primer seperti: pertanian yang mengalami penurunan akibat alih fungsi lahan dengan rata-rata alih fungsi lahan sebesar 193,8 Ha dalam 5 (lima) tahun terakhir dari total 969 Ha atau setara dengan 1,84% dari total lahan pertanian yang ada di Kabupaten Cirebon serta belum berkembangnya pemanfaatan teknologi pertanian dalam upaya peningkatan produktivitas tanaman padi per satuan luas lahan secara maksimal. Namun penurunan angka kemiskinan ini terbilang drastis, dari yang awalnya secara berurutan 14,41% di Tahun 2016 dan 12,97% di Tahun 2017, menjadi 10,70% di Tahun 2018.



Selain kemiskinan, masalah lain yang masih menjadi tantangan yaitu: IPM Kabupaten Cirebon sebesar 68,05 tahun 2018 masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat (71,30:2018) dan Nasional (71,39:2018) serta masih belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan pelayanan sosial (aksesibilitas untuk PMKS).

Selama ini permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja sasaran terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih berkualitas ini adalah :

- a. Permasalahan struktur, artinya bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon masih belum optimal dan belum menunjukkan hasil capaian kinerja yang dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, hal ini dikarenakan kemungkinan adanya kelemahan dalam proses perencanaan pembangunan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan dan keterbatasan sumber daya/anggaran yang merupakan persoalan klasik yang seringkali selalu menyandera para pengambil keputusan dan kebijakan untuk bisa menginisiasi dan mengintervensi program dan kegiatan yang mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.
- b. Kemiskinan juga berhubungan dengan tingkat pendidikan masyarakat (RLS Kabupaten Cirebon stagnan di angka 6,62 tahun 2018) sehingga diperlukan program dan kegiatan kolaboratif yang mampu menekan angka kemiskinan;
- c. Selain itu, masalah kemiskinan juga berhubungan dengan laju pertumbuhan penduduk (2,97:2018 meningkat dari 1,32:2017) dan jumlah angkatan kerja, tingkat pengangguran di daerah (TPT Kabupaten Cirebon 8,89:2018), maka perlu sinergitas antar beberapa stakeholder dan pengambil keputusan untuk bekerja sama lintas sektoral sehingga bisa menurunkan angka kemiskinan.

Persoalan kemiskinan dan kesejahteraan hingga saat ini masih diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk upaya penyelesaiannya meskipun dalam beberapa aspek telah dibangun



sinergitas dan kerjasama dengan lembaga terkait terutama pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon yang cukup tinggi. Permasalahan mendasar lainnya belum adanya upaya penyelesaian permasalahan kemiskinan berbasis spasial maupun sektoral berdasarkan tingkat urgensi pokok permasalahan kemiskinan tersebut. Pemenuhan hak pelayanan dasar yang berpihak pada keluarga miskin harus terus mendapat afirmasi dari Pemerintah Kabupaten Cirebon, dan disisi lain program pengentasan kemiskinan lebih difokuskan pada aspek pemberdayaan ekonomi dengan pendekatan klasifikasi jenis dan bentuk sumber kemiskinan. Sehingga target pengurangan setengah penduduk miskin di dalam KLHS di tahun 2030 dapat terlaksana dan diwujudkan.

b. Ketahanan Pangan

Isu ketahanan pangan di banyak daerah saat ini mulai mengkhawatirkan, termasuk di Kabupaten Cirebon. Masih adanya desa yang masuk dalam kategori desa rawan pangan (23 desa tahun 2014; Bappeda 2014) dan masih ditemuinya kasus stunting di beberapa desa data terakhir di tahun 2017 terjadi 10,91% (setara dengan 20.017 kasus dibagi 181.532 balita) kasus yang turun menjadi 8,68% (setara dengan 15.765 dibagi 181.532 jumlah balita) di tahun 2018. Mengukur persoalan ketahanan pangan ini setidaknya menggunakan beberapa indikator, yaitu: *Pertama*, ketersediaan meliputi produksi, produktivitas pangan, alih fungsi lahan, teknologi; *Kedua*, Akses dan distribusi pangan meliputi jalan produksi, gudang/lumbung pangan, tata niaga; *Ketiga*, keanekaragaman/diversifikasi pangan; *Keempat*, stabilitas harga pangan; *Kelima*, mutu dan keamanan pangan.

Berdasarkan data yang tersedia, Kabupaten Cirebon termasuk kategori kabupaten yang memiliki kerentanan dalam kelima isu diatas, diantaranya :

- 1) Belum memadainya ketersediaan gudang pangan, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun gudang pangan ditingkat masyarakat



- sebagai tempat menyimpan cadangan pangan yang akan bermanfaat di masa-masa pengeklik dan masa-masa darurat;
- 2) Distribusi pangan ke masyarakat belum merata, meskipun telah banyak didorong untuk berdirinya lembaga-lembaga distribusi pangan ditingkat masyarakat (LDPM);
 - 3) Menurunnya produksi tanaman pangan utama karena menurunnya produktivitas tanaman per satuan luas, tantangan dan kebutuhan akan alih fungsi lahan, pencemaran lingkungan, perubahan iklim dan kekeringan;
 - 4) Ketergantungan masyarakat pada jenis pangan beras dan kurangnya diversifikasi pangan terutama pangan non beras;
 - 5) Tantangan semakin berkurangnya area lahan tanaman pangan karena tingginya kebutuhan dan resiko alih fungsi lahan sebagai dampak kebutuhan akan perumahan dan pengembangan industri manufaktur yang sejatinya membutuhkan lokasi dan tanah untuk mendirikan bangunan rumah dan pabrik.

Berdasarkan dokumen KLHS, isu kerawanan pangan lebih didominasi oleh persoalan kekeringan sawah dan alih fungsi lahan dan hutan yang masih terus terjadi. Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menginisiasi lahirnya kebijakan yang bertujuan untuk mencegah tingginya laju alih fungsi lahan dengan pendekatan insentive dan disinsentive dengan melakukan pembuatan Perda Perlindungan Lahan Pangan Abadi (LP2B) tingkat kabupaten Cirebon. Sedangkan persoalan kekeringan, lebih dikarenakan masih minimnya upaya reboisasi yang dilakukan dalam rangka mengembalikan fungsi lahan serta kurang berfungsinya saluran-saluran irigasi secara baik serta kurang diterapkannya penghitungan dan pengendalian serta pemanfaatan air secara berkelanjutan.

c. Kesehatan

Kesehatan adalah isu strategis yang pernah direkomendasikan dalam RPJMD 2014-2019 Pemerintah Kabupaten Cirebon, dan hingga saat ini, di bidang kesehatan pun masih menyisakan berbagai catatan penting yang perlu mendapat perhatian ekstra Pemerintah Kabupaten Cirebon,



diantaranya: masih adanya resiko angka kematian bayi meskipun telah terjadi penurunan dari 3,99% tahun 2017 menjadi 2,61% tahun 2018 yang menjadi salah satu penyebab utamanya karena kurangnya kompetensi petugas dalam kegawatdaruratan neonatal di puskesmas, sehingga perlu upaya peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan bimbingan teknis. Selain itu, masih belum memadainya rasio tenaga medis dan paramedic (0,259 tahun 2017) terhadap 1000 penduduk sehingga kurang optimalnya pelayanan kesehatan di puskesmas, sehingga perlu adanya penerimaan CPNS untuk formasi tenaga medis dan paramedic berdasarkan standar pelayanan minimal dimasing-masing pusat layanan kesehatan.

Persoalan kesehatan masih mengalami tantangan dalam mengembalikan paradigma kesehatan yang masih terjebak pada tindakan kuratif, namun melupakan pentingnya tindakan promotif, preventif dan rehabilitatif. Secara umum, beberapa persoalan di bidang kesehatan yang penting mendapat perhatian ke depannya, antara lain:

- 1) Masih terdapat persoalan AKI dan AKB. Karenanya penting memperhatikan beberapa indikator, yaitu: kesehatan ibu, bayi, dan balita meliputi kematian ibu, bayi, balita; gizi ibu, bayi, dan balita; cakupan imunisasi dan kunjungan ibu hamil;
- 2) Terbatasnya jumlah tenaga kesehatan serta kapasitas yang dimiliki. ketersediaan tenaga medis akan berpengaruh pada mutu pelayanan kesehatan, sehingga penting untuk diperhatikan terkait kecukupan (kuantitas) dan kapasitas (kualitas) tenaga kesehatan yang ada;
- 3) Kesadaran akan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang masih rendah; Penyehatan lingkungan meliputi perilaku hidup bersih dan sehat, pengendalian penyakit (menular dan non menular);
- 4) Belum tercapainya *universal coverage* kesehatan (UHC Kabupaten Cirebon meningkat dari 84,7% tahun 2017 setara dengan 1.926.850 peserta dibagi dengan 2.272.898 jiwa menjadi 96,08% di tahun 2018 setara dengan 2.017.854 peserta di bagi total penduduk 2.100.092 jiwa) seharusnya adalah 100%.



Selain itu, dalam dokumen KLHS juga tercatat masih terdapatnya kasus gizi buruk, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang masih rendah dan terus meningkat kualitasnya dari 56,03% tahun 2016 naik menjadi 58,53% tahun 2017 dan menjadi 62,08% di tahun 2018, masih adanya penyakit menular dan andemik, pelayanan kesehatan yang belum optimal serta akreditasi standar pelayanan kesehatan yang belum merata.

Berangkat dari persoalan-persoalan tersebut, muara dari masalah kesehatan di Kabupaten Cirebon yang menjadi tantangan besar adalah soal PHBS yang seharusnya menjadi kesadaran publik yang dapat digerakkan bukan hanya oleh kampanye Pemerintah Kabupaten, melainkan juga oleh komunitas-komunitas di tingkat lokal maupun pihak swasta. PHBS harusnya menjadi gerakan bersama guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kabupaten Cirebon.

d. Pendidikan

Berdasarkan data capaian indikator kinerja bidang pendidikan berbasis input, output dan outcome kegiatan di tahun 2108 menunjukkan angka 96,88 yang artinya masuk dalam kategori “baik”, artinya capaian ini belum maksimal, mengingat masih ada beberapa catatan persoalan di dunia pendidikan, antara lain:

1. Masih tingginya minat siswa untuk melanjutkan sekolah ke Kota Cirebon dan kabupaten atau kota lainnya.
2. Rawan Drop Out (DO) SD dan SMP yang lokasi rumah siswa jauh dari sekolah terutama dipedesaan dan Angka putus sekolah (Jenjang SD 0,01:2017, 0,01:2018 dan jenjang SMP 0,29:2017, 0,24:2018) dan mengulang sekolah pada jenjang pendidikan SD dan SMP masih relatif tinggi;
3. Rasio guru dan murid belum mencapai kondisi yang ideal. Rasio antara guru dan murid (jenjang SD 20:2017, 21:2018 dan jenjang SMP 16:2017, 15:2018) di semua jenjang pendidikan mengalami fluktuasi dimana jumlah penambahan murid tidak seimbang dengan penambahan jumlah guru serta persebaran guru di Kabupaten Cirebon belum merata, apalagi ditambah dengan setiap tahunnya



banyak guru yang pensiun namun tidak diikuti dengan penerimaan formasi CPNS guru;

4. Kualifikasi guru SD, SLB dan SMP masih kurang (guru SD dan SLB dibawah D-II, Guru SMP dibawah D-III), dan permasalahan pada pola perkembangan karier guru dalam pelaksanaan materi, rotasi maupun promosi;
5. Indeks pendidikan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini karena rendahnya rata-rata lama sekolah yang disebabkan banyak siswa pada jenjang pendidikan SD dan SMP mengalami putus sekolah dan rawan drop out;
6. Sarana prasarana belajar belum memadai, pelaksanaan materi lokal belum mantap serta masih dibutuhkannya peningkatan system pelaporan berbasis online sebagai upaya peningkatan kualitas manajemen pendidikan;
7. Jumlah Taman Kanak – Kanak masih kurang dan persebarannya tidak merata karena sebagian besar ada di kawasan perkotaan;
8. Masih adanya disharmonisasi antara kurikulum dan orientasi lembaga-lembaga kursus dengan dunia kerja;
9. Pendidikan agama perlu semakin diarahkan pada kualitas substansi beragama, guna mendukung perbaikan perilaku (akhlak) siswa.

Menyelesaikan persoalan pendidikan ini bukan hanya menjadi tanggung-jawab Pemerintah Kabupaten Cirebon saja, melainkan dibutuhkan partisipasi yang kuat dari seluruh stakeholders yang ada, mulai dari masyarakat secara luas hingga peran pihak swasta, sehingga terjadi sinergi dalam menyelesaikan masalah pendidikan yang ada.

Selain itu diperkuat juga dengan dokumen KLHS yang mencatat persoalan pendidikan terkait dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, antara lain :

1. Masih terdapat anak putus sekolah



2. Kualitas para pengajar belum sesuai dengan kebutuhan (angka guru layak mengajar jenjang SD 94,05:2017, 95,42:2018 dan jenjang SMP 96,46:2017, 97,27:2018)
3. Kesenjangan kesejahteraan antara tenaga kependidikan honorer dengan tenaga kependidikan ASN
4. Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan (Akreditasi sarpras jenjang SD 99,95:2017 terhadap seluruh unit sekolah jenjang SD, 97,70:2018 dengan predikat mutu A sebanyak 319, mutu B 578 unit dan mutu C 1 Unit yang belum di akreditasi 21 unit dan jenjang SMP 98,00:2017, 85,00:2018 dengan nilai mutu A 99 unit, mutu B 57 unit, nilai mutu C 3 unit dan yang belum melakukan akreditasi sebanyak 28 unit)

Persoalan akses dan kualitas pendidikan menjadi persoalan utama yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk membangun kepercayaan publik, mulai dari kualitas tenaga pendidik termasuk metode pembelajaran hingga peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung. Metode pembelajaran yang menarik akan mendorong siswa belajar dengan menyenangkan, dan inovasi ini ke depan harus dikembangkan dalam rangka meningkatkan minat anak usia sekolah untuk bersekolah. Sedangkan untuk persoalan akses, perlu dipikirkan soal distribusi sekolah maupun alternatif-alternatif lain, seperti menggandeng pihak swasta maupun komunitas yang dapat membantu mengembangkan model pendidikan alternatif.

e. Kebudayaan

Indikator kinerja dalam mewujudkan Kabupaten Cirebon sebagai daerah wisata berbasis budaya sudah sangat tepat, bahkan realisasinya melebihi ekspektasi yang direncanakan, hal ini dikarenakan adanya pergeseran destinasi wisata dari Kota Bandung ke Daerah Cirebon serta karena akses jalan tol Cikampek - Palimanan dan Palimanan - Kanci yang mendukung aksesibilitas untuk mengunjungi Kabupaten Cirebon yang mana fasilitas ini memudahkan mobilitas wisatawan dalam melakukan perjalanan. Namun bukan berarti tidak ada lagi persoalan di sektor ini,



beberapa permasalahan yang penting diperhatikan, misalnya: kurangnya kreativitas manajemen kepariwisataan dalam mengkreasikan program dan even pariwisata di Kabupaten Cirebon; Masih belum maksimalnya dukungan dari pihak pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat terhadap even wisata, budaya dan kesenian yang dilaksanakan di Kabupaten Cirebon terutama wisata yang berbasis keunikan dan khas Cirebon.

Kabupaten Cirebon yang memiliki kekayaan kebudayaan faktanya masih banyak yang belum terkelola dengan baik. Hal ini dapat dikarenakan kurangnya *branding*, promosi dan pengemasan kebudayaan sehingga belum berdampak terhadap pariwisata, kurangnya upaya dalam pelestarian budaya daerah, potensi budaya lokal belum terangkat secara nasional dan global dan belum teridentifikasi potensi kekayaan budaya daerah.

Komunitas-komunitas lokal yang bergerak di isu kebudayaan pun tidak kalah banyaknya, hanya sayangnya belum ada database yang lengkap untuk ini, sehingga teridentifikasi dengan jelas kebudayaan yang masih ada, hampir punah atau bahkan sudah punah, agar bisa dihidupkan kembali dan dijadikan sebagai pendukung sektor pariwisata. Untuk itu, kehadiran Pemerintah Kabupaten dibutuhkan dalam rangka memfasilitas komunitas-komunitas kebudayaan yang ada sehingga dapat disinergikan dengan sektor pariwisata.

f. Ketenagakerjaan

Isu ketenagakerjaan adalah isu serius yang hingga saat ini masih dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon, dimana masih terdapat angka pengangguran (8,89%:2018). Angka pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan lapangan kerja pastinya menimbulkan masalah pengangguran. Sebagian tenaga kerja tidak terserap oleh lapangan kerja yang ada karena kecepatan pertumbuhan lapangan kerja baru kalah oleh kecepatan pertumbuhan penduduknya, khususnya terkait tingginya tingkat pertumbuhan angkatan kerja baru dan arus migrasi masuk sehingga mengakibatkan tidak semua pencari kerja memperoleh pekerjaan meskipun angka tingkat kesempatan kerja di



Kabupaten Cirebon adalah 90,7 tahun 2107 dan 90,4 tahun 2108. Selain itu rendahnya tingkat pendidikan formal mayoritas angkatan kerja di Kabupaten Cirebon sehingga berpengaruh pada produktivitas dan nilai tambah pekerja.

Meski sudah dilakukan berbagai upaya inisiasi program pendidikan dan pelatihan (training) teknis kompetensi ketenagakerjaan, namun belum sepenuhnya cocok dengan kebutuhan perusahaan dengan angka besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan baru mencapai 56,27% di tahun 2017 dan 50% pada tahun 2018, serta masih terkendalanya pelaksanaan kegiatan training menyangkut kurikulum, kebutuhan teknis/instruktur dan anggaran berbanding jumlah angkatan kerja yang ada di Kabupaten Cirebon.

Tingginya angka pengangguran juga diupayakan untuk diatasi melalui penyediaan berbagai program yang dapat menginisiasi pembentukan semangat *entrepreneurship* pada para pekerja dan kalangan remaja dan pemuda, namun itu pun belum juga mendapatkan hasil yang maksimal.

Selain itu, masih terdapat juga sengketa atau perselisihan yang terjadi seringkali tidak memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja melalui mekanisme perjanjian bersama 77,77% ditahun 2017 dan 60,5 tahun 2018. Pemerintah juga mengembangkan model ketenagakerjaan yaitu Tripartit, Dewan Pengupahan dan Serikat Pekerja/Buruh untuk meminimalisir persoalan ketenagakerjaan.

Saat ini lapangan kerja terutama di sektor industri manufaktur yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar memang masih terbatas. Sedangkan di sisi lain, sektor pertanian dan kerajinan justru kekurangan tenaga kerja, namun yang berminat ke arah sana tidaklah banyak. Kompleksitas masalah ini lah yang semakin memperumit kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Cirebon.

Pendekatan yang ditempuh dalam penyelesaian persoalan pengangguran saat ini memang masih terbelang konservatif, dimana sektor industri masih begitu diandalkan dalam penyelesaian persoalan



ketenagakerjaan. Pendekatan berbasis spasial/kewilayahan belum banyak ditempuh, yaitu dengan menjadikan desa/kelurahan sebagai arena Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) berbasis aset lokal, dimana persoalan ketenagakerjaan diharapkan dapat selesai di masing-masing wilayah melalui kegiatan ekonomi yang tumbuh massif.

Pemerintah Kabupaten Cirebon telah banyak melakukan upaya-upaya pelatihan kerja yang berbasis kompetensi (55,65:2017 dan 70,79:2018), kewirausahaan (81,63:2017 dan 78,78:2018) dan kemasyarakatan (16 kali : 2017 dan 9 kali 2018) meskipun upaya ini belum maksimal dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan saat ini di Kabupaten Cirebon

g. Gender dan pemberdayaan perempuan

Berdasarkan dokumen KLHS, beberapa catatan atas permasalahan ketimpangan gender, antara lain:

1. kurangnya pembinaan, pelatihan dan pemberdayaan perempuan yang dilakukan secara merata;
2. belum adanya kesempatan yang sama untuk perempuan mendapatkan pekerjaan yang layak;
3. masih terdapatnya pola pemikiran masyarakat yang membatasi jenjang pendidikan untuk perempuan;
4. belum adanya perda untuk kesetaraan gender

Catatan atas permasalahan di bidang gender dan pemberdayaan perempuan juga masih pada persoalan klasik, yaitu partisipasi perempuan yang masih rendah dalam bidang politik, baik dalam proses pengambilan kebijakan, partisipasi dalam institusi politik seperti: partai politik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Di sisin lain, masih dijumpai juga kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga maupun pelecehan seksual yang korbannya tidak sedikit dan seringkali enggan untuk melapor karena alasan malu atau bahkan



tidak tahu, mengingat masih minimnya program-program terkait pemberdayaan perempuan, baik di tingkat kabupaten maupun desa yang bertujuan membongkar kesadaran dan meningkatkan pengetahuan perempuan dalam bidang politik, ekonomi, sosia, budaya dan keamanan.

Kesadaran akan pentingnya membangun relasi gender yang setara menjadi fokus penting yang ke depan harus mendapat perhatian besar dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender sebagaimana menjadi salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan.

h. Ketersediaan air bersih dan pengelolaan sanitasi

Ketersediaan air bersih dan pengelolaan sanitasi di Kabupaten Cirebon hingga saat ini masih menjadi persoalan yang juga turut mempengaruhi percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Beberapa persoalan terkait dengan sanitasi dan air bersih yang masih dihadapi oleh Kabupaten Cirebon, antara lain :

1. Berkurangnya sumber mata air bersih. Sumber mata air bersih di Kabupaten Cirebon terus menyusut akibat makin luasnya lahan kritis dan peningkatan jumlah penggunaannya
2. Adanya penurunan kualitas dan kuantitas air tanah. Sumber air tanah di Kabupaten Cirebon terus menyusut akibat makin luasnya lahan kritis dan peningkatan jumlah penggunaannya. Selain itu kualitas juga semakin menurun dengan adanya intrusi air laut serta masuknya bahan pencemar akibat buruknya pengelolaan sanitasi
3. Minimnya sarana dan prasarana penyediaan air seperti jaringan pipa dan bak penampungan. Minimnya sarana dan prasarana penyediaan air sangat dirasakan oleh masyarakat. Hal ini menjadi salah satu penyebab masih buruknya kondisi sanitasi karena sebagian masyarakat masih memanfaatkan sungai untuk kegiatan MCK.
4. Belum optimal pengelolaan sumber air bersih, sehingga penggunaan air bisa lebih efisien dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.



Konsep kelangkaan air merujuk pada kesulitan dalam memperoleh sumber air bersih dan memburuknya dan menipisnya sumber air yang tersedia. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kelangkaan air adalah perubahan iklim, penggunaan air yang berlebihan, dan peningkatan polusi. Banyak daerah dipengaruhi oleh fenomena ini dan mengalami kelangkaan air setiap tahun. Di Kabupaten Cirebon, capaian indikator kinerja terkait penyediaan air bersih bagi rumah tangga terus mengalami peningkatan dan melampaui target setiap tahunnya. Sayangnya, ketersediaan air bersih di Kabupaten Cirebon masih mengandalkan sumber air dari Kabupaten Kuningan dan diharapkan dari waduk Jati Gede yang akan operasionalisasi dalam waktu dekat.

Sedangkan untuk sanitasi, persoalan yang dihadapi adalah *Rendahnya angka aksesibilitas pelayanan kesehatan; masih terdapat lingkungan dengan sanitasi buruk, ditandai dengan rendahnya akses terhadap sarana fisik dan pelayanan sanitasi.* Pada umumnya kelompok miskin tidak memiliki akses terhadap sanitasi dasar atau dengan kata lain melakukan buang air besar di tempat terbuka atau di sungai dan saluran drainase. Membuang air limbah ke tempat terbuka terkait dengan terbatasnya fasilitas pengolahan limbah cair yang tersedia. Kondisi ini ditemukan di perdesaan maupun di perkotaan. Pembuangan limbah cair ke sungai dan ke tempat terbuka lainnya akan mengurangi kualitas air tanah, bahkan dapat memicu penyebaran penyakit lingkungan.

i. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi

Pertumbuhan penduduk yang tinggi seringkali dianggap sebagai hal yang merisaukan apalagi bila tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tapi tidak merata juga berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial, terutama bila tidak diimbangi dengan penambahan lapangan kerja. Dengan kata lain apabila pertumbuhan penduduk lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan ekonomi maka pertumbuhan penduduk akan menjadi masalah, terlebih bila terdapat kesenjangan pendapatan yang cukup tinggi. Pertumbuhan penduduk yang positif akan memperluas lahan hunian dan mengurangi lahan usaha bagi penduduk itu sendiri. Angka beban



tanggung jawab penduduk Kabupaten Cirebon pada tahun 2017 adalah sebesar 38,13 artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban ekonomi sekitar 38 orang usia tidak produktif. Ini mengalami penurunan bila dibanding tahun sebelumnya.

Namun lebih dari itu, terkait pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, masih terdapat beberapa persoalan penting yang harus dipikirkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon terutama dalam era industry 4.0 saat sekarang ini, diantaranya :

- 1) Pergeseran sektor unggulan ekonomi dari yang semula didominasi sektor pertanian menjadi sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran. (aspek industry: Kabupaten Cirebon sebagai salah satu tujuan relokasi industry dari kawasan JABODETABEK, Karawang, Cikarang yang telah jenuh)
- 2) Laju pertumbuhan ekonomi relatif rendah.
(Rata-rata dalam kisaran 5%)
- 3) Kesenjangan pendapatan masyarakat Kabupaten Cirebon masih tinggi karena terdapat peningkatan ketimpangan atau ketidakmerataan pengeluaran antar penduduk yang ditunjukkan dengan tingginya rasio gini meskipun masih berada pada taraf tingkat ketimpangan rendah (karena $GR < 0,4$).
- 4) Masih rendahnya daya beli masyarakat dan PDRB per kapita dan kontribusi bahan makanan terhadap laju inflasi masih tinggi.

j. Pembangunan infrastruktur

Permasalahan yang menjadi sorotan dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Cirebon, antara lain :

1. terkait dengan penyediaan sumber daya air yang hanya mengandalkan dari sumber air yang terbatas yaitu waduk jatigede, outflow (limpasan) dari Kabupaten Kuningan dan curah hujan.
2. masih minimnya penyediaan sumber daya air yang ada, pengelolaan saluran air irigasi juga masih terdapat permasalahan berupa kebocoran-kebocoran di beberapa titik sehingga penerimaan air



untuk kegiatan persawahan terutama di bagian ujung mengalami kekurangan.

3. keberadaan sedimentasi berupa lumpur yang tinggi di sepanjang sungai dan saluran irigasi, sehingga perlu kegiatan pengosongan sedimen yang rutin.

Selain itu, berdasarkan dokumen KLHS, beberapa catatan penting atas pembangunan infrastruktur, antara lain :

1. masih kurangnya pembangunan infrastruktur perdesaan dalam rangka mendukung penguatan pembangunan sektor ekonomi perdesaan;
2. minimnya pembangunan infrastruktur kepariwisataan yang memadai. Keberadaan potensi wisata di Kabupaten Cirebon belum diimbangi dengan pelayanan ketersediaan infrastruktur penunjang pariwisata yang dapat melayani kebutuhan para wisatawan, seperti:
 - a. *Recreative and Sportive Plan*;
 - b. *Residential Tourist Plan*, terdiri dari penginapan/hotel dan tempat makan/restoran;
 - c. Sarana pelengkap atau penunjang kepariwisataan untuk membuat wisatawan dapat lebih lama tinggal di tempat wisata;
 - d. Sarana penjualan, berupa toko-toko yang menjual barang-barang souvenir atau benda lain khusus wisatawan;
 - e. Utilitas, yaitu terkait dengan ketersediaan jaringan air bersih, listrik, drainase, dan sanitasi (tersedianya fasilitas toilet/MCK);
 - f. Prasarana sosial, seperti sarana pendidikan dan kesehatan;
 - g. Transportasi, yaitu ketersediaan sarana transportasi (moda kendaraan yang digunakan menuju tempat wisata) dan aksesibilitas (kemudahan mencapai kawasan wisata);
 - h. infrastruktur jalan sebagai sarana akses jalan masuk menuju kawasan wisata yang melewati perkampungan warga berada pada kondisi aspal yang rusak dan jalan berlubang.



3. masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA);

Ketersediaan infrastruktur sarana jalan seperti keberadaan tol yaitu tol cipali dan tol trans Jawa sudah ada dan beroperasi. Secara keseluruhan, penyediaan jalan konektivitas sudah baik, namun masih membutuhkan beberapa pembangunan jalan baru untuk memecah kemacetan yang mulai tinggi intensitasnya di Kecamatan Talun dan Kecamatan Kedawung yang berbatasan langsung dengan Kota Cirebon mengingat jalan provinsi sudah sangat padat intensitas kendaraannya.

Masih terdapat banyak persoalan infrastruktur di Kabupaten Cirebon, oleh karena sumber daya finansial yang terbatas, maka ke depan penting difikirkan orientasi atau fokus perhatian yang akan dituntaskan terlebih dahulu, misalnya yang terkait dengan kepariwisataan. Sedangkan infrastruktur perdesaan dapat berbagi peran dengan Pemerintah Desa yang memiliki kewenangan dan pendanaan untuk melaksanakan pembangunan, namun dapat diarahkan agar bersinergi dengan pembangunan daerah.

k. Peningkatan industri dan inovasi

RPJMD Jawa Barat menyebutkan bahwa peran dari wilayah Metropolitan Cirebon Raya (MCR) dikembangkan sebagai Metropolitan budaya dan sejarah, dengan sektor unggulan wisata, industri, dan kerajinan. Penetapan MCR mengarahkan Kabupaten Cirebon sebagai pusat pertanian, industri, dan pariwisata. Sebagai konsekuensinya Cirebon akan menjadi alternatif relokasi industri, pengembangan pariwisata, dan pertanian. Permasalahan yang akan dihadapi Kabupaten Cirebon adalah :

1. Menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang industry termasuk industry pariwisata;
2. Mendukung dan menyiapkan para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) dalam kemudahan akses permodalan, inovasi dan pemanfaatan teknologi, dan daya saing produk IKM;
3. Belum optimalnya pemanfaatan kawasan peruntukan industri.



4. Industrialisasi yang dapat meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan.
5. Paket kebijakan pelayanan perizinan yang berpihak pada pengusaha lokal.
6. Menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan.
7. Penataan alih fungsi lahan akibat adanya lokasi industri dan pertambangan dengan tetap mempertahankan lahan-lahan pertanian produktif untuk menopang ketahanan pangan terutama pada lahan pertanian kelas 1 (satu).
8. Menyiapkan instrumen insentif dan disentif untuk menjaga alih fungsi lahan pertanian yang sesuai dan berkeadilan bagi petani.
9. Pengembangan sektor-sektor ekonomi kerakyatan yang berbasis pertanian, industri kecil menengah, dan pariwisata
10. Penguatan jiwa kewirausahaan dan peningkatan daya saing tenaga kerja.

Isu SDM menjadi isu krusial kaitannya upaya peningkatan sektor industri dan inovasi. Akan tetapi yang penting disadari juga adalah untuk daerah dengan karakter rural yang kuat seperti kabupaten Cirebon, pendekatan industri dengan penguasaan teknologi yang tinggi bukanlah satu-satunya pendekatan yang dapat menyelesaikan persoalan kesejahteraan. Pendekatan industri penting dikembangkan ke arah industri kreatif berbasis potensi lokal yang ada di banyak wilayah di Kabupaten Cirebon.

1. Permukiman

Terkait dengan permasalahan permukiman di Kabupaten Cirebon, berdasarkan dokumen KLHS, beberapa catatan yang penting untuk diperhatikan, antara lain :

1. Minimnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah
2. Minimnya tempat pembuangan sampah sementara



3. Minimnya MCK/ Jamban layak pakai
4. Minimnya pasokan air bersih
5. Minimnya sistem drainase ramah lingkungan
6. Pemukiman kumuh
7. Pencemaran akibat limbah domestik (septiktank yang dekat dengan pengambilan air tanah)
8. Penataan jalan lingkungan

Kondisi yang darurat mendapat perhatian adalah keberadaan permukiman kumuh yang sudah cenderung tinggi di sepanjang sempadan sungai di Kecamatan Kedawung yaitu tercatat sebesar kurang lebih 788 permukiman kumuh. Keberadaan permukiman kumuh dan rumah layak huni tersebar tidak hanya di Kecamatan Kedawung akan tetapi terdapat di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Cirebon (SK Bupati Nomor : 651.2/Kep.631-DCKTR/2014) adalah Kecamatan Sumber, Weru, Palimanan, Arjawinangun, Ciledug, Plumbon, Gunung Jati, Losari, Astana Japura dan lemah abang. Pencegahan terjadinya kawasan kumuh diantaranya dapat diantisipasi dengan pembangunan infrastruktur berupa rumah susun, mengingat di Kabupaten Cirebon belum memiliki rusun untuk mengatasi permasalahan permukiman kumuh yang tinggi.

m. pola produksi dan konsumsi

Pola produksi dan konsumsi berkelanjutan perlu diterapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Cirebon untuk mendorong pencapaian tujuan ke-12 tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goal's* (SDGs). Pola produksi berkelanjutan adalah pola atau mekanisme sistematis yang mengatur produksi yang benar-benar mengikuti kaidah-kaidah yang menjamin keseimbangan ekosistem dan kesinambungan khususnya sumberdaya alam. Sedangkan, konsumsi berkelanjutan (*sustainable consumption*) merupakan suatu pola konsumsi barang dan jasa yang tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Konsumsi yang bertanggung jawab artinya memperhatikan asal usulnya dan menjauhi produk yang terkait praktik-praktik ilegal, perdagangan manusia, pengrusakan lingkungan dan penghancuran *livelihood* masyarakat setempat.



Isu dan tantangan permasalahan di Kabupaten Cirebon terkait pola produksi dan konsumsi adalah :

- 1) Pola produksi yang benar-benar mengikuti kaidah-kaidah yang menjamin keseimbangan ekosistem dan kesinambungan khususnya sumberdaya alam.
- 2) Pola konsumsi barang dan jasa yang tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Konsumsi yang bertanggung jawab artinya memperhatikan asal usulnya dan menjauhi produk yang terkait praktik-praktik ilegal, perdagangan manusia, pengrusakan lingkungan dan penghancuran *livelihood* masyarakat setempat.
- 3) Pola produksi dan konsumsi berkelanjutan dalam rangka menyongsong Metropolitan Cirebon Raya (MCR).
- 4) Pemerintah, bisnis, dan masyarakat yang memperhatikan isu-isu perubahan iklim, kota berkelanjutan, dan penggunaan sumber daya berkelanjutan.
- 5) Kantor ramah lingkungan (*eco office*) dan pengadaan barang serta jasa ramah lingkungan (*green public procurement*) oleh pemerintah daerah
- 6) Pelaku usaha menerapkan sistem manajemen lingkungan, efisiensi sumber daya, dan produksi bersih, menghasilkan dan menggunakan produk ramah lingkungan tersertifikasi maupun terverifikasi melalui mekanisme *ecolabel*.
- 7) Pemerintah menerapkan standar pelayanan di fasilitas publik dengan prioritas konten ramah lingkungan.

n. sumber daya kelautan dan perikanan

Salah satu arah kebijakan pembangunan di daerah dalam RPJPN 2004-2025 bertujuan untuk mendorong perekonomian daerah dengan menekankan kebijakan pada pengembangan wilayah-wilayah yang memiliki potensi maritim termasuk potensi wisata bahari dengan menerapkan manajemen modern; serta menumbuhkan lembaga-lembaga pendukung ekonomi berbasis maritim seperti asuransi, perbankan,



teknologi, industri perkapalan, pendidikan/*training* kemaritiman, serta kerjasama antar negara. Sedangkan arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Jawa Barat Tahap keempat (periode 2018-2023), menekankan program pada Strategi pengembangan bisnis kelautan Jawa Barat pada tahap keempat diarahkan pada pengembangan perikanan komersil di Pantai Selatan dan Pantai Utara, pengembangan usaha pembuatan kapal penangkap ikan, pengembangan usaha penunjang rekreasi, pengembangan usaha pengolahan hasil, pengembangan usaha berbahan baku dari produk yang tidak dimanfaatkan langsung, pengembangan usaha permodalan, pengembangan usaha informasi kelautan, pengembangan budaya kelautan (*marine culture*), pengembangan kota-kota pantai (*coastal cities*), pengembangan wisata kelautan dan pengembangan usaha ekokonservasi.

Misi Pembangunan Agribisnis termasuk Sektor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cirebon 2004-2025 yang meliputi : 1) Pengembangan industri input yang memadai dari segi jumlah, kualitas, waktu, yang sesuai dengan tuntutan pengembangan agribisnis hilir (termasuk sektor agribisnis kelautan dan perikanan); 2) Pengembangan teknologi budidaya dan organisasi produksi yang dapat meningkatkan produktivitas tanaman, ternak, dan ikan dengan menggunakan lahan minimal dan ramah lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan aman bagi konsumen; 3) Peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil produk primer; 4) Pengembangan sistem pemasaran yang berorientasi pada perubahan permintaan konsumen; 5) Pengembangan penunjang sistem yang berfungsi mengatur dan memandu sistem pertanian dan bisnis kelautan; 6) Peningkatan wawasan dan budaya bahari melalui pendidikan dan penyadaran masyarakat tentang kelautan, pelestarian nilai-nilai budaya, restorasi dan konservasi budaya bahari.

Namun berdasarkan hasil evaluasi atas kebijakan RPJMD 2014-2019 serta data-data sekunder dan primer, masih terdapat beberapa persoalan di sektor ini, diantaranya: **Pertama**, tingkat kemiskinan yang masih tinggi di masyarakat nelayan. Berdasarkan hasil survey pada delapan kecamatan pesisir, rata-rata konsumsi beras per kapita per tahun pada rumah tangga nelayan hanya sebesar 180 kg per kapita per tahun



dengan keragaman batas bawah dan batas atas antara 118 sd 261 kg per kapita per tahun. Jika melihat data konsumsi beras ini maka masyarakat pesisir di delapan kecamatan Kabupaten Cirebon masih tergolong miskin dan tidak sejahtera atau berada di bawah garis kemiskinan karena hidup dibawah kecukupan pangan < 2.172 kalori orang/ hari. **Kedua**, para nelayan melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan dan budidaya dengan kondisi yang stagnan atau tidak berkembang. Berdasarkan hasil survey, rata-rata Indeks Nilai Tukar nelayan adalah sebesar 0,73 dengan rata-rata indeks harga nelayan (HT) sebesar Rp. 31.769.487,- per tahun dan rata-rata indeks harga bayar nelayan (HB) sebesar Rp. 45.288.705,- per tahun. terdapat sedikit ketidakpuasan pada hasil servei pada nilai harga nelayan (HT) terhadap nilai bayar nelayan (HB), hasil survei indeks nilai tukar nelayan sebesar 0,73 angka ini menunjukkan kondisi sosial ekonomi atas hasil nelayan masih tergolong rendah. **Ketiga**, terjadinya penurunan daya dukung lingkungan, karena tingginya pencemaran lingkungan serta sedimentasi muara dan alur sungai sangat tinggi; **Keempat**, pemanfaatan ilmu dan teknologi perikanan masih rendah dan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. **Kelima**, belum terjadinya diversifikasi produk-produk perikanan menuju agroindustri perikanan, yang dapat berpengaruh pada kesejahteraan.

o. ekosistem daratan, hutan, degradasi lahan, dan keanekaragaman hayati

Persoalan lain yang saat ini menjadi tantangan pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten Cirebon adalah terjadinya degradasi lahan pertanian yang sangat berkaitan dengan fenomena alih fungsi lahan yang memerlukan kearifan para pengambil keputusan dalam meluluskan perubahan fungsi lahan-lahan pertanian terutama pada kawasan pertanian beririgasi teknis (kelas satu). Selain itu fenomena degradasi lahan ini memerlukan perhatian yang lebih mengingat pertambahan penduduk selalu mengalami peningkatan sehingga membutuhkan peran antisipasi atau pencegahan dalam pengali fungsian lahan-lahan dengan pemberian insentif berupa kewajiban bayar pajak yang lebih rendah dan pemberian fasilitas akses yang lebih terhadap aspek produksi pertanian.



Selain itu, kawasan lahan pertanian yang masuk dalam program LP2B perlu mendapatkan sanksi dalam praktek alih fungsi lahan sebagai disinsentif.

p. Pertanian dan Agribisnis

Kondisi pertanian di Kabupaten Cirebon sebenarnya diuntungkan karena masih terdapat lahan sawah yang sebagian besar merupakan sawah irigasi teknis dan setengah teknis. Selain itu, terdapat peluang pengembangan agribisnis, seperti: tersedia industri pengolahan hasil dan pedagang besar yang mampu menampung hasil panen, daya dukung kondisi agroklimat untuk komoditas perkebunan dan ternak, ketersediaan sumber pakan hewan yang melimpah, sarana dan prasarana keswan dan kesmavet tersedia (rumah pemotongan hewan, rumah pemotongan unggas, alat-alat, dan lain-lain, serta sistem informasi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner tersedia.

Namun sayangnya, peluang tersebut tidak serta merta mampu ditangkap dan dimanfaatkan oleh petani, mengingat ada banyak persoalan yang hingga hari ini dihadapi petani dalam penguatan sektor pertanian dan agribisnis, diantaranya: **Pertama**, persoalan pengairan. Jaringan irigasi mengalami gangguan: saluran mengalami pendangkalan, kerusakan bangunan irigasi. Selain itu juga terjadi kekeringan pada musim kemarau dan banjir menggenangi areal pertanian pada musim hujan akibat menurunnya fungsi manajemen dalam pengairan. **Kedua**, berkurangnya lahan pertanian produktif/persoalan lahan/alih fungsi lahan, dimana ada keterbatasan dan penurunan kapasitas sumberdaya lahan. Luas kepemilikan lahan petani yang rendah rata-rata kurang dari 3.000 meter persegi. Selain itu, terjadi pula alih fungsi lahan pertanian kurang terkendali. **Ketiga**, kualitas, mentalitas dan keterampilan sumberdaya petani rendah ditambah rendahnya regenerasi petani sehingga mengancam sektor pertanian. **Keempat**, sistem alih teknologi masih lemah dan kurang tepat sasaran. **Kelima**, adanya keterbatasan akses terhadap layanan usaha terutama permodalan, selain itu juga kelembagaan petani dan posisi tawar petani pun masih terbilang rendah serta lemahnya koordinasi antar lembaga terkait dan birokrasi. **Keenam**, petani masih dihadapkan



pada persoalan rantai tataniaga yang panjang dan sistem pemasaran yang belum adil. Selain itu juga terdapat pesaing dari luar dan perusahaan besar yang berorientasi pasar lokal. Selain itu, pengawasan distribusi sarana dan prasarana produksi pertanian perikanan, kelautan, perkebunan, kehutanan dan peternakan. **Ketujuh**, aksesibilitas pelaku usaha, pertanian, perikanan, kelautan, perkebunan, kehutanan dan peternakan melalui penguatan kemitraan serta jaringan pasar. **Kedelapan**, minimnya kegiatan reboisasi lahan dan hutan. **Kesembilan**, serangan hama dan penyakit pada lahan pertanian. **Kesepuluh**, infrastruktur dan sarana produksi alat pertanian, perikanan, kelautan, perkebunan, kehutanan dan peternakan yang memadai. **Kesebelas**, kebijakan makro ekonomi yang belum berpihak kepada petani.

Selain tingginya potensi erosi, degradasi sungai dan laut (muara) juga disebabkan pembuangan limbah industri langsung masuk ke perairan sungai tanpa melalui pengolahan. Isu pencemaran air sungai yang menjadi sorotan banyak pihak yakni pembuangan limbah industri batu alam. Dampak yang ditimbulkan sangat kompleks karena selain penurunan kualitas perairan dan pendangkalan sungai juga mengakibatkan penurunan produktivitas sektor pertanian dan perikanan

Pertanian menggunakan mayoritas air tawar yang tersedia. Yang menyedihkan adalah bahwa sekitar 60% dari air ini terbuang karena metode pertanian yang tidak efisien dan sistem irigasi bocor. Selain itu, pestisida dan pupuk disapu bersih di sungai dan danau yang selanjutnya mempengaruhi populasi manusia dan hewan.

4.2. ISU STRATEGIS

Berangkat dari permasalahan yang ada, maka penting dirumuskan isu-isu strategis yang akan menjadi fokus perhatian penanganannya oleh Pemerintah Daerah. Isu strategis merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Akan tetapi, perumusan isu strategis tidak dapat dilepas isu-isu strategis nasional, provinsi maupun daerah lain yang berbatasan dengan Kabupaten Cirebon.



4.2.1. Telaahan Kebijakan Nasional

4.2.1.1. Teknokratik RPJMN 2020-2024

Tantangan pembangunan Nasional dalam RPJMN 2020 – 2024 semakin kompleks dan penuh dengan ketidak pastian terutama akibat dari arus globalisasi dan dampak kemajuan Industri 4.0. seperti yang tergambar dalam rancangan teknokratik RPJMN 2020 -2024. Tantangan itu meliputi Ketidakpastian Global, Pertumbuhan Ekonomi yang Stagnan, Defisit transaksi berjalan yang meningkat, Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital. Resiko yang penuh ketidak pastian ini masih akan terus mewarnai pertumbuhan dan perkembangan perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akan cenderung stagnan dengan tren melambat, masingmasing diproyeksikan sebesar 3,6 dan 3,8 persen per tahun.

Disamping itu yang menjadi tantangan terberat Indonesia dalam kancah perekonomian dunia karena terus menurunnya harga komoditas internasional, yang merupakan komoditi ekspor utama Indonesia. Mengingat Indonesia masih mengandalkan perekonomiannya dari memanfaatkan sumber daya alam untuk menopang pertumbuhan dan kemakmuran. Komoditi itu meliputi batu bara dan minyak kelapa sawit. Adapun risiko ketidakpastian lainnya yang perlu diantisipasi antara lain perang dagang, perlambatan ekonomi China, dan tekanan normalisasi kebijakan moneter yang beralih dari AS ke kawasan Eropa.

Indonesia masih akan dihadapkan pada melambatnya pertumbuhan ekonomi bahkan stagnan. Utamanya setelah krisis ekonomi 1998, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya pada kisaran 5,3 persen per tahun. Dan dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan pada kisaran 5,0 persen. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut, sulit bagi Indonesia untuk dapat naik kelas menjadi Negara berpendapatan tinggi atau mengejar ketertinggalan pendapatan per kapita negara peers (negara sahabat yang selevel). Stagnannya pertumbuhan ekonomi disebabkan utamanya oleh tingkat produktivitas yang rendah seiring tidak berjalannya transformasi struktural.



Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat adalah :

- (1) Regulasi yang tumpang tindih dan birokrasi yang menghambat;
- (2) Sistem dan besarnya penerimaan pajak belum cukup memadai;
- (3) Kualitas infrastruktur yang masih rendah terutama konektivitas dan energi;
- (4) Rendahnya kualitas SDM dan produktivitas tenaga kerja;
- (5) Intermediasi sektor keuangan rendah dan pasar keuangan yang dangkal;
- (6) Sistem inovasi yang tidak efektif;
- (7) Keterkaitan hulu-hilir yang lemah.

Tidak berkembangnya industri pengolahan berdampak pada kinerja perdagangan internasional Indonesia. Hingga saat ini, ekspor Indonesia masih didominasi oleh ekspor komoditas dengan jasa transportasi asing, tidak berbeda dengan periode 40 tahun yang lalu. Rasio ekspor terhadap PDB terus menurun dari 41,0 persen pada tahun 2000 menjadi 20,3 persen pada tahun 2017. Akibatnya, Indonesia masih mengalami defisit transaksi berjalan hingga hampir mendekati 3 persen PDB, sementara beberapa negara peers lainnya sudah mencatatkan surplus. Di tengah kondisi keuangan global yang ketat, peningkatan defisit transaksi berjalan menjadi penghambat bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi tersebut memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Digital teknologi membantu proses pembangunan di berbagai bidang di antaranya pendidikan melalui distance learning, pemerintahan melalui e-government, inklusi keuangan melalui fin-tech, dan pengembangan UMKM seiring berkembangnya e-commerce. Namun di sisi lain, perkembangan revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan di dunia. Studi



dari Mckinsey memperkirakan 60 persen jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan oleh otomatisasi. Di Indonesia diperkirakan 51,8 persen potensi pekerjaan yang akan hilang. Di samping itu, tumbuhnya berbagai aktivitas bisnis dan jual beli berbasis online belum dibarengi dengan upaya pengoptimalan penerimaan negara serta pengawasan kepatuhan pajak atas transaksi-transaksi tersebut. Hal ini penting mengingat transaksi digital bersifat lintas negara.

Dari faktor penghambat diatas RPJMN nasional melakukan akselerasi dalam penyelesaian masalah nasional sebagai Prioritas Nasional yang terutang dalam buku ke empat RPJMN 2020 – 2024 antara lain :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing
4. Membangun Karakter Bangsa
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhuhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Rancangan teknokratis RPJMN 2020 - 2024 mengusung tema “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan”. Yang difokuskan pada beberapa aspek antara lain :

1. Fokus Pembangunan Manusia
 - a. Pelayanan dasar dan perlindungan social
 - b. SDM berkualitas dan berdaya saing
 - c. Pembangunan karakter bangsa
2. Fokus pembangunan ekonomi
 - a. Pangan
 - b. Energy
 - c. Pariwisata, ekonomi kreatif dan digital



- d. Industry manufaktur
- e. Kelautan dan kemaritiman
3. Fokus pembangunan kewilayahan
 - a. Sentra-sentra pertumbuhan
 - b. Komoditas unggulan daerah
 - c. Pertumbuhan perkotaan
4. Fokus pembangunan infrastruktur
 - a. Transportasi
 - b. Telekomunikasi
 - c. Sumber daya air
 - d. Perumahan dan pemukiman
5. Fokus pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan
 - a. Hukum dan regulasi
 - b. Pertahanan dan keamanan
 - c. Politik
6. Pengarusutamaan
 - a. Kesetaraan Gender
 - b. Tata kelola (governance)
 - c. Kerentanan bencana dan perubahan iklim
 - d. Modal social budaya
 - e. Transformasi digital

Dalam dokumen RPJPN 2005 -2025 tahap keempat dinyatakan bahwa tujuan pembangunan adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”.

Isu strategis secara kewilayahan dalam dokumen teknokratik RPJMN 2020 – 2024 adalah :

1. Penurunan Ketimpangan Antar Wilayah
 - a. Kemiskinan KTI (12,3%), KBI (8,5%), perdesaan (13.1%) dan perkotaan (7,02%) yang tinggi (BPS, 2018)
 - b. Ketimpangan Pendapatan Perdesaan (0,324) – Perkotaan (0,4)
 - c. Konsentrasi kegiatan ekonomidi KBI terutama Pulau Jawa



2. Penguatan Pusat Pertumbuhan Wilayah
 - a. Tingkat keberhasilan Pusat Pertumbuhan Baru yang rendah (10 dari 12 KEK, 4 dari 14 KI, 2 dari 4 KPBPB, dan 10 Destinasi Wisata);
 - b. Konektivitas dari dan menuju Pusat-Pusat Pertumbuhan yang lemah;
 - c. Kawasan Strategis Kabupaten yang belum berkembang.
3. Pengelolaan Urbanisasi
 - a. Penduduk perkotaan yang akan mencapai 60% dan bonus demografi 2030;
 - b. Kontribusi urbanisasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang rendah (1% urbanisasi menghasilkan hanya 4% PDB, di India 13% PDB);
4. Pemanfaatan Ruang
 - a. Konflik ruang yang semakin meningkat (15.525 kasus periode 2015-2018)
 - b. Desa-desa dalam kawasan hutan dan perkebunan besar tidak dapat melaksanakan kewenangannya terutama untuk pembangunan infrastruktur (20.000 desa)
 - c. Kejadian Bencana akibat pemanfaatan ruang yang belum sesuai semakin meningkat (sekitar 2.000 kasus kejadian Banjir, Longsor, Kebakaran Hutan, dsb)
5. Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Peningkatan Daya Saing Daerah
 - a. Akses dan kualitas pelayanan dasar yang terbatas (perumahan layak baru 37,8%, air minum 72%, sanitasi layak 67,5%, dsb) (BPS, 2017);
 - b. Ketergantungan APBD terhadap Dana Transfer yang tinggi (rata-rata >70% APBD Kab/Kota dan >50% APBD Provinsi dari Pusat) serta sumber Pendanaan Non APBN yang kurang optimal;
 - c. Peraturan Perundangan yang belum harmonis serta Kerjasama dan Inovasi Daerah yang belum berkembang;
 - d. Proses perizinan yang lama dan berbiaya tinggi (118 Hari di Papua).



Kabupaten Cirebon akan mengakselerasi isu strategis nasional hasil kajian teknokratik yang sesuai dengan konteks daerah, berbasis permasalahan dan potensi yang ada di daerah. Nantinya saat RPJMN ini telah disahkan akan terus diharmonisasi dan akan menjadi salah satu pedoman dalam penyusunan RPJMD, sehingga terjadi sinergi antara pembangunan di tingkat nasional dan daerah.

4.2.1.2 Telaahan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara. Dengan Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.

Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri atas :

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan, infrastruktur dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.



Dengan muatan standar (a) Jenis Pelayanan Dasar; (b) Mutu Pelayanan Dasar; dan (c) Penerima Pelayanan Dasar.

Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. Kebutuhan Dasar Warga Negara dalam SPM adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Dengan mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.

Jenis Pelayanan Dasar untuk daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar;
- c. pendidikan kesetaraan;
- d. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- e. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- g. pelayanan kesehatan balita;
- h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- i. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- l. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- m. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- n. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;



- o. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus);
- p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
- r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
- s. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- t. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- u. pelayanan informasi rawan bencana;
- v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
- y. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- bb. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- cc. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Pencapaian target pelaksanaan SPM sesuai dengan standar pelayanan sampai dengan tahun 2018 sebagian besar belum mencapai angka 100%.

- a. pendidikan anak usia dini; capaian tahun 2018 adalah 66,40 (belum tercapai)
- b. pendidikan dasar; capaian tahun 2018 SD 117,05 SMP 115,08
- c. pendidikan kesetaraan; tahun 2018 SD 107,22 SMP 97,46 SMA 86,40 (belum tercapai)
- d. pelayanan kesehatan ibu hamil; tahun 2017:94,92; 2018:47,14 (belum tercapai)
- e. pelayanan kesehatan ibu bersalin; tahun 2017:93,61; 2018:47,90 (belum tercapai)



- f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir; 2017:103,03; 2018:52,40 (belum tercapai)
- g. pelayanan kesehatan balita; 2017:97,20; 2018:49,25 (belum tercapai)
- h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; 2017:74,18 (belum tercapai)
- i. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- l. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- m. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- n. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; 2017:15,35; 2018:6,84 (belum tercapai)
- o. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus); 2018:0,01
- p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; 2018:68,64% (belum tercapai)
- q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
- r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
- s. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- t. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- u. pelayanan informasi rawan bencana;
- v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
- y. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- bb. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan



- cc. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Dari 29 kriteria hanya 11 kriteria dan semua belum tercapai secara standar pelayanan minimal

4.2.2. Telaahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Telaahan terhadap Visi dan Misi Gubernur terpilih Jawa Barat merupakan sebuah tantangan untuk diselaraskan dengan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Cirebon terpilih yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman. Visi Bupati ini akan diselaraskan dengan Visi Gubernur Jabar yang akan menjadikan “Jabar Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”. Maksud dari visi tersebut adalah pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat berdaya saing dan mandiri. Dalam konteks Jawa Barat Kabupaten Cirebon akan menjadi entitas penting untuk disejahterakan selaras dengan menjadikan Cirebon Sejahtera dan Maju.

Inovasi: pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan. Kabupaten Cirebon sebagai salah satu pintu gerbang Jawa Barat di daerah Timur akan sangat membutuhkan inovasi-inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup melalui inovasi pelayanan public yang didukung oleh reformasi birokrasi.

Kolaborasi: perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antartingkatan pemerintahan, antarwilayah, dan antarpelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan. Sinergitas dan kerjasama secara terpadu dalam menyelesaikan permasalahan di Kabupaten Cirebon merupakan tantangan tersendiri dalam upaya harmonisasi Visi kolaborasi Jabar dengan Visi Cirebon.



Untuk mengoperasionalkan Visi Jabar dituangkan dalam Misi

Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertakwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban. Konsep Jabar Juara secara “batin”. Secara umum misi ini memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat Jawa Barat sebagai manusia dengan nilai-nilai Pancasila dan meningkatkan peran rumah ibadah sebagai pusat pembangunan peradaban di Jawa Barat ini sendiri. Selaras dengan misi Agamis di Kabupaten Cirebon yang sebagai upaya meningkatnya kualitas hidup bermasyarakat yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama, budi pekerti dan beretika.

Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif. Misi ini diarahkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas hingga ujung batas wilayah; agar rakyat Jawa Barat dapat menikmati pendidikan dan kesehatan; perempuan Jawa Barat mampu mengekspresikan potensi kebaikannya dengan optimal, dan para pemuda menyadari panggilan jiwanya dan dapat berperan vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Misi ini sangat relevan dengan misi berbudaya di Kabupaten Cirebon sebagai upaya menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat.

Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah. Misi ini dalam penjawaban visi Jabar Juara Lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi memiliki inti utama yang berpusat pada pembangunan infrastruktur untuk pemerataan pembangunan. Infrastruktur adalah investasi pembangunan yang akan mendorong lahirnya pusat pertumbuhan baru, mengurangi beban logistik yang mampu menjaga stabilitas harga, serta mempercepat perpindahan manusia dan barang antar kota dan kabupaten. Berbagai aktivitas pembangunan dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup agar daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak terlampaui dan kelestarian ekosistem tetap terjaga. Misi ini sangat mendukung keberhasilan pencapaian misi maju di kabupaten



Cirebon dimana infrastruktur wilayah, reformasi birokrasi pertumbuhan ekonomi menjadi hala tuju yang ingin dicapai. Sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah.

Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan. Misi ini membawa amanah yang besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Jawa Barat. Ekonomi umat yang adil dan sejahtera yang dicita-citakan akan dapat diwujudkan dengan meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi Jawa Barat. Merupakan suatu keniscayaan bahwa masalah-masalah yang hadir kini adalah masalah baru masa kini, yang hanya bisa diselesaikan dengan cara yang baru pula. Kolaborasi misi ini dengan misi Cirebon sejahtera sebagai sinergi pembangunan akan saling menguatkan karena dengan misi meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kesehatan dan ekonomi.

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam istilah tata kelola, branding yang kini tengah marak diangkat adalah mengenai 'Good Governance' atau 'Tata Kelola yang Baik'. Good Governance sendiri dapat diimplementasikan di berbagai skala, mulai dari perusahaan hingga pemerintahan dengan delapan pilarnya yaitu konsensus, partisipasi, ketaatan pada hukum, efektivitas dan efisiensi, setara dan inklusif, responsif, transparan dan akuntabel. Misi ini sangat sesuai dengan misi maju yang lebih focus pada tata kelola pemerintahan dengan peningkatan indeks reformasi birokrasi dalam rangka terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan smart serta penguatan otonomi desa.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan menetapkan 5 (lima) isu strategis di dalam RPJMD, yaitu :



1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia;
2. Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial;
3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan; dan
5. Reformasi birokrasi

Isu strategis ini menjadi pedoman bagi Kabupaten Cirebon dalam menyusun isu strategis sesuai dengan kondisi yang ada di tingkat daerah, sehingga terjalin sinergi antar dokumen perencanaan di daerah dan provinsi.

Untuk menyelesaikan dan menjawab isu strategis dituangkan dalam Program prioritas pembangunan dalam RPJMD Jawa Barat 2018 – 2023 yang dikenal dengan 9 prioritas utama pembangunan Jawa Barat yang meliputi:

1. Akses pendidikan untuk semua, meliputi:
 - a. Kelas pintar untuk semua
 - b. Satu Universitas di setiap kabupaten/kota
2. Desentralisasi pelayanan kesehatan, meliputi:
 - a. Layad rawat
 - b. Pembangunan dan perbaikan rumah sakit
 - c. Posyandu Juara
3. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi, meliputi:
 - a. Ekonomi digital
 - b. Inkubator bisnis
 - c. Creative/Start-up hub
 - d. Gudang tani dan ikan Juara
 - e. Kredit 0%
4. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata, meliputi:
 - a. Satu kabupaten/kota satu destinasi wisata unggul
 - b. Infrastruktur pariwisata
 - c. Pengembangan SDM pariwisata



5. Pesantren juara, meliputi:
 - a. Modernisasi dana umat
 - b. Tunjangan santri dan ulama
 - c. Modernisasi manajemen pesantren
 - d. Satu pesantren satu produk (trenmarket)
6. Infrastruktur konektivitas wilayah, meliputi:
 - a. 100% jalan mulus di Jawa Barat
 - b. Pembangunan dan perbaikan jalan kereta antar kota
 - c. Pengembangan transportasi massal perkotaan
 - d. Pembangunan pelabuhan dan transportasi sungai
7. Gerakan bangun desa (Gerbang desa), meliputi:
 - a. Satu desa satu Bumdes (OVOP)
 - b. Tunjangan desa
 - c. Irigasi pertanian desa
 - d. Internet masuk desa
8. Subsidi gratis golekmah, meliputi:
 - a. Rumah gratis
 - b. Transportasi gratis
 - c. Layanan kesehatan gratis
 - d. Pendidikan gratis
 - e. Sembako gratis
9. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah, meliputi:
 - a. Provinsi pintar (E-planning, E-budgeting, E-monev, E-remunerasi kinerja, dll)
 - b. Kota/desa pintar
 - c. Pemekaran wilayah

4.2.3.RPJMD Kabupaten/kota sekitar

Penyusunan dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Cirebon telah dilakukan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Cirebon.



4.2.3.1. Kota Cirebon

Hubungan dengan Kota Cirebon akan difokuskan pada: **Pertama**, upaya membangun komunikasi terkait batas daerah antara Kabupaten Cirebon dengan Kota Cirebon. **Kedua**, menjadi Kabupaten Cirebon sebagai penyangga aktifitas ekonomi di Kota Cirebon, khususnya ekonomi sektor primer dan sekunder.

4.2.3.2. Kabupaten Kuningan

Pertama, memperkuat industri kreatif di sektor sekunder. Salah satu isu strategis yang penting dalam dokumen teknokratik RPJMD Kabupaten Kuningan dan terkait erat dengan Kabupaten Cirebon adalah menyangkut isu pengembangan pariwisata. Cirebon yang menjadi salah satu lalu lintas menuju ke Kabupaten Kuningan, dan kesempatan ini akan dimanfaatkan dalam rangka mengembangkan produk industri kerajinan yang diperuntukkan bagi para wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Kuningan. **Kedua**, penyelesaian potensi konflik daerah perbatasan akan secara dilakukan guna menciptakan ketertiban masyarakat dan menjaga hubungan baik antar daerah. **Ketiga**, pembangunan daerah-daerah perbatasan dengan Kabupaten Kuningan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. **Keempat** membangun akselerasi dan harmonisasi program pembangunan wilayah perbatasan dalam mendukung kegiatan perekonomian.

4.2.3.3. Kabupaten Brebes

Terkait dengan Kabupaten Brebes, maka Kabupaten Cirebon akan membangun komunikasi terbuka dalam rangka penyelesaian dan pengembangan wilayah perbatasan.

4.2.3.4. Kabupaten Majalengka

Pola dan tema hubungan yang akan dikembangkan dengan Kabupaten Majalengka, meliputi: **Pertama**, memfasilitasi kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan kabupaten/kota; **Kedua**, mengembangkan pola-pola kerjasama pembangunan lintas batas dengan



kabupaten; **Ketiga**, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan pada kawasan koridor secara selektif yang didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai.

4.2.3.5. Kabupaten Indramayu

Hubungan dengan Kabupaten Indramayu akan berfokus pada Pengembangan wilayah perbatasan Indramayu dan Kabupaten Cirebon, yang bertujuan untuk mendukung pembangunan di wilayah Kabupaten Cirebon, terutama daerah-daerah di perbatasan.

4.2.4. Telaahan Kebijakan Kabupaten Cirebon

4.2.4.1. RPJPD Kabupaten Cirebon

Dalam RPJPD Kabupaten Cirebon disebutkan bahwa misi RPJMD Keempat Tahun 2019-2024, yaitu:

Misi pertama: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Bidang agama. Pembangunan dibidang agama diprioritaskan pada pengimplementasian ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari yang ditandai dengan penurunan penyakit masyarakat dan kriminalitas sebesar 2% dan melek membaca Al Qur an sebesar 95%, peningkatan kualitas pendidikan agama, dan optimalisasi peran lembaga sosial keagamaan, peningkatan toleransi antar umat beragama, kemandirian dalam penyelenggaraan keagamaan.

Bidang Pendidikan. Pembangunan di bidang pendidikan diprioritaskan pada peningkatan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf melalui pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat terutama bagi keluarga kurang mampu, tuntas program wajib belajar dua belas tahun disertai dengan peningkatan kualitas siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, peningkatan akses pelayanan pendidikan menengah dan bantuan bea siswa dari keluarga yang kurang mampu, perintisan program wajib belajar lima belas tahun, pengembangan pelayanan pendidikan luar sekolah dan pendidikan informal berbasis potensi daerah dan pengembangan sekolah kejuruan berbasis kompetensi berskala nasional dan internasional, peningkatan kerja sama dengan



perguruan tinggi, dan pendidikan ketrampilan dan penguasaan multimedia bagi masyarakat.

Bidang perpustakaan. Pembangunan dibidang perpustakaan diprioritaskan pada peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pembangunan taman bacaan di setiap desa.

Bidang Kesehatan. Pembangunan dibidang kesehatan diprioritaskan melalui upaya pencegahan, pemberantasan, dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, peningkatan jumlah, mutu dan jenis tenaga kesehatan, pemberdayaan profesi kesehatan (institusi), dan terwujudnya sistem insentif dan disinsentif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diprioritaskan pada peningkatan kemandirian dan daya saing perempuan dalam memperoleh kesempatan berusaha, peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan. Sedangkan peningkatan perlindungan terhadap anak dilakukan melalui optimalisasi peran keluarga dan lembaga perlindungan anak.

Bidang Sosial. Pembangunan dibidang sosial diprioritaskan pada penurunan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) melalui peningkatan pemberdayaan PMKS; dan peningkatan kuantitas dan kualitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga dan kelompok masyarakat melalui program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, serta peningkatan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

Bidang Kepemudaan dan Olahraga. Pembangunan dibidang kepemudaan dan olahraga diprioritaskan pada peningkatan prestasi olah raga menjadi 9 cabang olah raga melalui pemanfaatan kawasan olahraga masyarakat dan olahraga prestasi dengan penambahan pembangunan GOR; dan peningkatan peran serta kepemudaan dalam pembangunan sebanyak 40% melalui program peningkatan peran serta kepemudaan, penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, pencapaian kemandirian pemuda dan olahraga, mempertahankan keunggulan olah raga Kabupaten



Cirebon di tingkat Provinsi Jawa Barat dan nasional, mewujudkan olah raga sebagai bagian dari budaya masyarakat.

Bidang Kebudayaan. Pembangunan bidang kebudayaan diprioritaskan pada penguatan pelestarian ragam budaya tradisional dan kearifan lokal masyarakat Cirebon melalui aktualisasi dan pengembangan nilai budaya dan kearifan lokal, pengelolaan kekayaan dan pengelolaan keragaman budaya.

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Pembangunan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera diprioritaskan pada penurunan dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk, pengembangan model operasional Bina Keluarga Balita (BKB), posyandu, dan Pendidikan Anak Dini Usia (PADU), pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi (KR) mandiri, kemandirian keluarga, peningkatan kualitas hidup keluarga, dan peningkatan kualitas data kependudukan

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri. Pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri tetap diprioritaskan pada peningkatan wawasan, kesadaran dan tindakan masyarakat dalam tatanan kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara melalui kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan; pendidikan politik masyarakat; peningkatan pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dan membangun konsensus antar pemangku kepentingan dalam penerapan demokrasi.

Misi kedua: Meningkatkan Lingkungan Hidup yang Lestari

Bidang Lingkungan Hidup. Pembangunan dibidang lingkungan hidup diprioritaskan pada peningkatan kualitas lingkungan melalui peningkatan pelaksanaan program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup berbasis teknologi ramah lingkungan; partisipasi dan kemitraan masyarakat dalam perlindungan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam, konsistensi dalam penegakan hukum, efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam, konservasi dan pemulihan kualitas lingkungan, sistem mitigasi dan penanggulangan bencana alam yang handal, memantapkan daya dukung lingkungan,



mendorong perilaku dan budaya ramah lingkungan di masyarakat, dan tertatanya kawasan rawan bencana.

Bidang Penataan Ruang. Pembangunan dibidang penataan ruang diprioritaskan pada peningkatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai RTRW, rencana kawasan strategis dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) melalui peran serta masyarakat, pemantapan sistem pengendalian dan koordinasi dalam pengaturan pembinaan, pelaksanaan serta pengawasan penataan ruang. terpeliharanya alokasi ruang kawasan lindung dan lahan sawah, optimalisasi kawasan budidaya untuk tumbuh dan berkembang tanpa mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan infrastruktur data dan informasi spasial telah dapat digunakan dengan mantap dalam mendukung pelaksanaan penataan ruang.

Bidang Pertanahan. Pembangunan dibidang pertanahan diprioritaskan pada peningkatan tertib administrasi inventaris asset tanah pemerintah daerah melalui pelaksanaan program penataan penguasaan, kepemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan menggunakan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Bidang Energi dan Sumber daya Mineral. Pembangunan dibidang energi dan sumber daya mineral diprioritaskan pada pengurangan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan melalui peningkatan pelaksanaan program pengawasan dan penertiban kegiatan penambangan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan, dan penyediaan sumber energi listrik bagi masyarakat miskin melalui pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan, diversifikasi alternatif sumber energi non migas.

Bidang Kelautan dan Perikanan. Pembangunan bidang kelautan dan perikanan diprioritaskan pada pelestarian sumber daya kelautan melalui pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dengan sasaran bertambahnya luas area tanaman mangrove di wilayah pesisir menjadi 450 ha bertambahnya jumlah terumbu karang buatan yang ditenggelamkan di laut menjadi 250 unit, peningkatan kesejahteraan nelayan, pengembangan perikanan komersial dan rekreasi, pengembangan usaha pengolahan hasil, pengembangan



sistem informasi kelautan dan perikanan, pengembangan budaya kelautan, dan pengembangan eko-konservasi kelautan.

Bidang Perumahan dan Permukiman. Pembangunan dibidang perumahan dan permukiman diprioritaskan pada peningkatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat, lingkungan sehat pemukiman, pengembangan perumahan dan pemberdayaan komunitas perumahan.

Bidang Kehutanan. Pembangunan dibidang kehutanan diprioritaskan pada pengamanan dan pencegahan kerusakan kawasan hutan melalui rehabilitasi hutan dan lahan, dan rehabilitasi hutan dan lahan.

Misi ketiga: Meningkatkan perekonomian yang kuat

Bidang ketenagakerjaan. Pembangunan dibidang ketenagakerjaan diprioritaskan pada peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja, pemantapan sistem jejaring kerja dan sistem informasi ketenagakerjaan, peningkatan peran lembaga ketenagakerjaan, sinergisitas sistem pendidikan dan ketenagakerjaan, peningkatan kesejahteraan pekerja, peningkatan tenaga kerja berbasis potensi lokal dan kewirausahaan, pengembangan kurikulum yang berbasis dunia kerja, dan penumbuhkembangan pelaksanaan hubungan industrial.

Bidang Ketransmigrasian. Pembangunan dibidang ketransmigrasian diprioritaskan pada peningkatan jumlah lokasi tujuan transmigrasi, jumlah transmigran yang memperoleh peluang berusaha dan tempat tinggal, dan pembinaan transmigran melalui program pengembangan wilayah transmigrasi dengan peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pembangunan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa diprioritaskan pada peningkatan peran serta masyarakat, kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah desa melalui program pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dan aparatur desa, dan pemberdayaan lembaga ekonomi pedesaan,



peningkatan pelaksanaan program desa membangun, dan peningkatan kesejahteraan aparatur desa.

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM).

Pembangunan dibidang KUMKM diprioritaskan pada peningkatan penguatan jaringan kelembagaan dan usaha, kapasitas SDM, sistem pembiayaan dan peluang pasar KUMKM melalui upaya penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif, pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah, pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah, perluasan pasar bagi usaha mikro, kecil dan menengah.

Bidang Pertanian. Pembangunan dibidang pertanian diprioritaskan pada peningkatan produksi dan nilai tambah atau produktivitas hasil pertanian, dan pengembangan pola agribisnis berbasis potensi lokal, perluasan pangsa pasar hasil pertanian, penguatan sistem pertanian, dan terpeliharanya lahan sawah.

Bidang Ketahanan Pangan. Pembangunan dibidang ketahanan pangan diprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan petani, diversifikasi pangan, penguatan kelembagaan petani, ketersediaan dan pengaturan pola distribusi hasil produksi.

Bidang Pariwisata. Pembangunan bidang pariwisata diprioritaskan pada peningkatan keunggulan daya tarik wisata di Kabupaten Cirebon melalui pengembangan produk wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan jati diri masyarakat Kabupaten Cirebon, peningkatan industri pariwisata melalui pengelolaan pariwisata yang lebih profesional, dan menciptakan masyarakat sadar wisata.

Bidang Perdagangan. Pembangunan dibidang perdagangan diprioritaskan pada revitalisasi pasar tradisional, pengembangan kemampuan inovasi dan kualitas produksi, peningkatan kemampuan sumber daya perdagangan, mendorong perdagangan berbasis potensi lokal yang berorientasi ekspor, perluasan jaringan perdagangan luar negeri, penataan distribusi barang, pemberdayaan produk dalam negeri dan pengembangan pasar dalam negeri, dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen melalui pendirian layanan pengaduan konsumen.

Bidang Industri. Pembangunan dibidang industri diprioritaskan pada peningkatan kemampuan sumber daya industri, pengembangan industri



kecil yang tangguh, peningkatan penggunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sistem produksi, penciptaan kesempatan kerja dalam jumlah besar, dan penerapan sistem insentif dan disinsentif.

Bidang Penanaman Modal. Pembangunan dibidang penanaman modal diprioritaskan pada peningkatan penciptaan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing melalui peningkatan pelayanan penanaman modal dengan berbasis sistem teknologi informasi-komunikasi, dan memanfaatkan data base peluang investasi di tingkat lokal dan regional,

Bidang Pekerjaan Umum. Pembangunan dibidang pekerjaan umum diprioritaskan pada peningkatan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, peningkatan pencegahan dan pengendalian banjir dan kekeringan, percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah tertinggal, peningkatan kemantapan infrastruktur yang telah ada, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur di wilayah strategis.

Bidang Perhubungan. Pembangunan dibidang perhubungan diprioritaskan pada peningkatan kelancaran distribusi barang dan jasa melalui peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan fasilitas perhubungan, pelayanan angkutan ke seluruh daerah pedesaan, pengendalian dan pengamanan lalu lintas, dan penataan angkutan umum.

Misi keempat: Mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel

Bidang Perencanaan Pembangunan. Pembangunan dibidang perencanaan pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas perencanaan pembangunan melalui pemantapan fungsi kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur perencana, dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).

Bidang Komunikasi dan Informatika. Pembangunan bidang komunikasi dan informatika diprioritaskan pada pemanfaatan sistem informasi komunikasi daerah untuk menginformasikan segala bentuk informasi yang berkaitan dengan hasil-hasil pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan di kabupaten Cirebon, menampung keluhan dan pengaduan masyarakat, dan pengembangan infrastruktur informasi dan komunikasi sampai seluruh desa dan kelurahan.



Bidang Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Pembangunan dalam bidang ini diprioritaskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas dan kuantitas belanja pembangunan, peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, kapasitas lembaga legislatif, kinerja pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif, dan kinerja PNS

Bidang Statistik. Pembangunan dibidang statistik diprioritaskan pada pelaksanaan sistem data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan.

Bidang Kearsipan. Pembangunan bidang kearsipan diprioritaskan pada peningkatan mutu penyelenggaraan kearsipan daerah dan kinerja pengelolaan kearsipan menuju tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pemanfaatan sistem informasi administrasi kearsipan di setiap instansi pemerintah daerah

Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil. Pembangunan bidang kependudukan dan catatan sipil diprioritaskan pada peningkatan pelayanan administrasi kependudukan (cepat, tepat, murah dan transparan) dan kualitas data kependudukan melalui pelaksanaan program sistem informasi administrasi kependudukan sampai tingkat desa.

4.2.4.2. RTRW Kabupaten Cirebon

Berdasarkan RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 disebutkan bahwa Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, harmonis, dan terpadu sebagai sentra pertanian, industri dan pariwisata yang mendukung PKN Cirebon.

Kebijakan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, harmonis, dan terpadu, meliputi :

1. pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan



2. peningkatan keterkaitan dan keterpaduan pengembangan kawasan yang berbatasan dengan kabupaten/kota tetangga.

Strategi untuk pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, meliputi:

1. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya;
2. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
3. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan beserta prasarana untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; dan
4. mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kerugian akibat bencana.

Strategi untuk peningkatan keterkaitan dan keterpaduan pengembangan kawasan yang berbatasan dengan kabupaten/kota tetangga, meliputi :

1. menjaga keterkaitan dan keterpaduan dalam mengembangkan kawasan perbatasan dengan kabupaten/ kota tetangga;
2. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang berbatasan dengan kabupaten/kota tetangga; dan
3. meningkatkan koordinasi dalam mengembangkan kawasan yang berbatasan dengan kabupaten/kota tetangga.

| Isu | Kebijakan | Strategi |
|------------------|---|---|
| sentra pertanian | a. perwujudan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan; | 1. mempertahankan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan; 2. mengendalikan alih fungsi peruntukan |



| | | |
|--|---|---|
| | | lahan pertanian pangan berkelanjutan 3. meningkatkan aksesibilitas, meningkatkan ketahanan pangan, penyediaan alat teknologi pra pasca panen, dan pengembangan pasca pertanian |
| | b. pengembangan jaringan sumber daya air untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian pangan berkelanjutan; | 1. mengembangkan dan memelihara bendungan, waduk, dan situ untuk menjamin ketersediaan air baku bagi kegiatan pertanian; 2. mengembangkan dan memelihara jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi untuk menjamin penyaluran air bagi lahan pertanian. |
| | c. pengembangan kawasan pesisir dan laut sesuai potensi serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. | 1. mengembangkan sentra budidaya perikanan air payau, dan sentra budidaya garam; 2. mengembangkan sarana dan prasarana |



| | | |
|-------------------|--|--|
| | | untuk menunjang Pengembangan kegiatan budidaya di kawasan pesisir dan laut. |
| Sentra Industri | 1. Peningkatan fungsi kawasan industri untuk meningkatkan daya saing kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; | 1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri; 2. Meningkatkan penataan lokasi kegiatan industri di dalam kawasan industri. |
| | 2. Pengembangan kawasan untuk kegiatan industri yang berdaya saing dan ramah lingkungan | 1. Mengembangkan kawasan industri terpadu sebagai pusat kegiatan industri; 2. Mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri. |
| Sentra Pariwisata | 1. pengembangan kawasan peruntukan pariwisata; | 1. merehabilitasi kawasan peruntukan pariwisata yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya; 2. mengembangkan wisata religi dan wisata bahari; dan |



| | | |
|-----------------------|---|--|
| | | 3. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pariwisata |
| | 2. pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pariwisata; | 1. mengembangkan pusat jasa dan promosi pariwisata di kawasan perkotaan; 2. memantapkan akses prasarana dan sarana untuk meningkatkan keterkaitan antara kawasan perkotaan dan kawasan-kawasan pariwisata |
| | 3. pengembangan keterpaduan antar pusat pariwisata. | meningkatkan keterkaitan dengan PKN di Provinsi Jawa Barat sebagai pusat pariwisata dalam kesatuan tujuan pariwisata |
| Pendukung PKN Cirebon | peningkatan fungsi dan pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala nasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup | 1. mengembangkan kawasan perekonomian sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala nasional; dan 2. mengembangkan dan memantapkan prasarana dan sarana untuk meningkatkan |



| | | |
|--|--|---|
| | | <p>keterkaitan antar pusat perdagangan dan jasa yang berskala nasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.</p> |
|--|--|---|

4.2.4.3. Sustainable Development Goal's/SDG's (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB) Kabupaten Cirebon (KLHS RPJMD)

Indonesia telah mengadopsi kesepakatan internasional tentang agenda Sustainable Development Goal's (SDG's)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diterbitkan pada 4 Juli 2017. Hal ini menunjukkan konsistensi pemerintah untuk melembagakan agenda TPB ke dalam program pembangunan nasional. Perpres tersebut menekankan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui empat platform partisipasi, yaitu pemerintah termasuk Pemerintah Daerah dan parlemen, filantropi dan bisnis, ormas, akademisi dan pakar dalam rangka menyukseskan pelaksanaan agenda TPB.

Gambar 4.1. Sustainable Development Goals (SDG's)





Berdasarkan dokumen KLHS Kabupaten Cirebon memiliki kepentingan dan komitmen yang kuat untuk turut berpartisipasi dalam pencapaian SDG's, mengingat berdasarkan permasalahan di atas, masih terdapat tujuan pembangunan yang memang masih harus dituntaskan oleh Pemerintah Kabupaten. Berdasarkan dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2023, maka Kabupaten Cirebon hanya melaksanakan 7 tujuan dengan 174 indikator TPB yang menjadi wewenang kabupaten. Dari 174 indikator yang ditetapkan dalam TPB Kabupaten Cirebon, hanya 61 (35,06%) indikator yang memiliki data sedangkan sebanyak 113 (64,94%) indikator tidak tersedia data. 7 Tujuan tersebut, adalah :

A. Isu strategis dan rekomendasi berdasarkan daya dukung daya tampung :

| TUJUAN | ISU STRATEGIS |
|---|--|
| Tujuan 1 Tanpa kemiskinan | Tingkat pertumbuhan penduduk meningkat |
| Tujuan 2 Tanpa kelaparan | Kekeringan sawah |
| | Adanya alih fungsi lahan dan hutan |
| | Minimnya kegiatan reboisasi lahan dan hutan |
| | Penurunan kualitas dan kuantitas hasil laut, pertanian |
| | Berkurangnya lahan pertanian yang produktif |
| | Serangan hama dan penyakit pada lahan pertanian |
| Tujuan 6 Air bersih dan sanitasi layak | <ul style="list-style-type: none">▪ Minimnya MCK/ Jamban layak pakai▪ Minimnya pasokan air bersih▪ Minimnya sistem drainase ramah lingkungan▪ Pemukiman kumuh▪ Pencemaran akibat limbah domestik |



| | |
|--|---|
| | <p>(septiktank yang dekat dengan pengambilan air tanah)</p> |
| | <ul style="list-style-type: none">▪ Limbah Industri Batu Alam, batik dan industri Lainnya▪ Pembuangan limbah industri dan rumah tangga langsung ke laut▪ Berkurangnya keragaman biota laut (udang, ikan dll)▪ Adanya perilaku masyarakat membuang sampah sembarangan▪ Kurangnya tempat pembuangan sampah sementara▪ Kurangnya kesadaran masyarakat pada pengelolaan sampah▪ Minimnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah▪ Minimnya pengawasan limbah rumah sakit dan industri▪ Kurangnya penegakan hukum terhadap limbah industri dan rumah sakit▪ Badan air seperti sungai mengalami pencemaran karena aktivitas warga▪ Pencemaran udara akibat kegiatan industri dan peternakan▪ Pengelolaan sampah yang belum maksimal berpotensi menimbulkan resiko bahaya |
| | <ul style="list-style-type: none">▪ Perilaku masyarakat membuang sampah▪ Belum memadai sistem drainase▪ Timbul banjir▪ Adanya pembangunan yang tidak sesuai peruntukan wilayah▪ Adanya kawasan mengalami banjir rob |



| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">▪ Kurangnya pemeliharaan DAS▪ Lemahnya infrastruktur pengelolaan SDA▪ Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup seperti pemeliharaan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup▪ Konflik kepentingan pemanfaatan SDA dengan kegiatan usaha |
|--|---|

B. Isu strategis dan rekomendasi dengan upaya tambahan

| TUJUAN | ISU STRATEGIS |
|---|---|
| Tujuan 3 Kehidupan sehat dan sejahtera | Pelayanan kesehatan yang belum optimal |
| Tujuan 4 Pendidikan berkualitas | <ol style="list-style-type: none">1. Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan2. Aksesibilitas sekolah3. Kapasitas mutu pendidikan4. Efisiensi biaya pendidikan |
| Tujuan 5 Kesetaraan gender | <ol style="list-style-type: none">1. Kurangnya pembinaan, pelatihan dan pemberdayaan perempuan secara merata2. Belum adanya kesempatan yang ekual untuk perempuan mendapatkan pekerjaan yang layak3. Belum adanya perda untuk kesetaraan gender |
| Tujuan 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi | <ol style="list-style-type: none">1. Kurangnya regulasi pengelolaan wilayah pariwisata2. Investasi belum optimal |



| | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">3. Tingkat pertumbuhan penduduk meningkat4. Belum berdayanya koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) dan para pengrajin kerajinan Cirebon5. Pengawasan kandungan bahan kimia berbahaya pada bahan makanan olahan masih lemah6. Kesenjangan kesejahteraan antara tenaga kependidikan honorer dengan tenaga kependidikan ASN |
|--|---|

4.2.4.4. Isu Strategis RPJMD Kabupaten Cirebon

Berangkat dari isu strategis yang ada di RPJPD dan memperhatikan kondisi empiris yang ada di daerah, serta bersinergi dengan dokumen teknokratik RPJMN dan dokumen RPJMD Provinsi Jawa Barat, maka dirumuskanlah isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi dan Pelayanan Publik;
2. Pengangguran dan Kemiskinan;
3. Kualitas Sumber Daya Manusia dan nilai-nilai kehidupan masyarakat;
4. Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi;
5. Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan;
6. Penyediaan dan Kemantapan Infrastruktur Wilayah;
7. Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.



| Isu Strategis Pembangunan | | |
|---|---|--|
| RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 | RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 | Teknokratik RPJM Nasional Tahun 2020 - 2024 |
| Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi | Pengarusutamaan a. Kesetaraan Gender b. Tata kelola (governance) c. Kerentanan bencana dan perubahan iklim d. Modal social budaya e. Transformasi digital |
| Pengangguran dan Kemiskinan | Kemiskinan, Pengangguran dan Masalah Sosial | |
| Kualitas Sumber Daya Manusia dan nilai-nilai kehidupan masyarakat | Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia | Pembangunan Manusia • Pelayanan dasar dan perlindungan social • SDM berkualitas dan berdaya saing • Pembangunan karakter bangsa |
| Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi | Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi yang Berkelanjutan | pembangunan ekonomi o Pangan o Energy o Pariwisata, ekonomi kreatif dan digital o Industry manufaktur |



| | | |
|--|---|---|
| | | o Kelautan dan kemaritiman |
| Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan | | |
| Penyediaan dan Kemantapan Infrastruktur Wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan | Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang | Fokus pembangunan kewilayahan a. Sentra-sentra pertumbuhan b. Komoditas unggulan daerah c. Pertumbuhan perkotaan |
| Keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat | | |

a. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Isu ini dipilih mengingat dibutuhkan kinerja birokrasi yang lebih baik lagi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat, mengingat fungsi pelayanan publik yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah. Selain itu, gambaran kondisi yang ada di bidang pendidikan dan kesehatan menggambarkan bagaimana kuantitas dan kualitas pelayanan publik yang merupakan hak dasar masyarakat, faktanya masih ditemukan berbagai persoalan penting.

Berbicara tentang reformasi birokrasi, memang bukan sekedar soal kecukupan jumlah saja, melainkan yang terpenting soal kualitas dari birokrasi itu sendiri, serta pelayanan yang diberikan kepada publik. Hingga saat ini, kita masih menemukan masih kurangnya sosialisasi dan kualitas serta jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan



daerah yang dilaksanakan yang berdampak pada tidak meratanya pembangunan, masih rendahnya profesionalisme aparatur dan masih terdapatnya sarana prasarana pemerintah yang kurang memadai dalam mendukung kinerja birokrasi, kualitas pelayanan publik, pelayanan data perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penataan peraturan perundang-undangan, dan kolaborasi pembangunan dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota.

Reformasi birokrasi mencakup pembenahan struktural, prosedural, kultural dan etika birokrasi. Terdapat tiga elemen utama yang melekat pada reformasi birokrasi yaitu, *pertama* reformasi keuangan daerah yang berfokus pada mekanisme penganggaran yang tepat sasaran dan langsung menyentuh kepentingan masyarakat luas, hal ini menuntun pada penyempurnaan proses kerja pemerintahan dalam hal penetapan tenggat waktu, indikator serta target yang tepat. *Kedua*, reformasi sumber daya aparatur daerah, yakni berkaitan dengan kualitas implementasi dari sebuah program kerja dan memusatkan perhatian kepada kesiapan sumberdaya manusia. *Ketiga*, reformasi pelayanan publik yakni kondisi pelayanan yang baik sebagai hasil dari reformasi keuangan dan sumberdaya aparatur.

Dalam pembenahan struktur dan alokasi sumber daya aparatur perlu dilakukan telaahan dan evaluasi terhadap keberadaan struktur organisasi, beban kerja di masing-masing struktur dan kinerja aparaturnya sehingga dari evaluasi ini diharapkan diperoleh hasil penempatan SDM (pemetaan) sesuai dengan keahlian dan kompetensi dan beban kerja pada struktur jabatan yang dilaksanakan.

Secara umum, isu terkait reformasi birokrasi dan pelayanan publik ini bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan yang ada dan terkait dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, diantaranya: menciptakan pelayanan publik yang bersih dan bebas dari korupsi; menata kelembagaan dan menempatkan birokrasi sesuai dengan kapasitas dalam rangka mewujudkan profesionalisme; meningkatkan kualitas pelayanan publik; membangun iklim birokrasi yang terintegrasi dengan kebudayaan lokal; menerapkan E-government untuk mendukung



pelayanan publik yang cepat, transparan dan terintegrasi; meningkatkan sistem pengendalian, evaluasi dan pengawasan pembangunan; dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia birokrasi.

b. Pengangguran dan Kemiskinan

Meski angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon terus mengalami penurunan secara signifikan tiga tahun belakangan, bahkan sudah mampu menembus angka 10,7% di Tahun 2018, namun bukan berarti persoalan kemiskinan sudah tidak krusial lagi.

Kemiskinan dan ketenagakerjaan menjadi permasalahan yang serius dan harus segera diatasi di Kabupaten Cirebon, mengingat masih terdapat cukup banyak jumlah penduduk miskin serta pengangguran, dimana persoalannya ada pada terbatasnya akses masyarakat terhadap lapangan kerja dan upah yang layak.

Namun persoalan seriusnya juga terletak pada terbatasnya lapangan pekerjaan di sektor formal, sedangkan di sisi lain, rendahnya kemampuan kewirausahaan dan keterampilan sesuai kebutuhan pasar. Sehingga penyelesaian masalah kemiskinan dan pengangguran ini memang tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan komprehensif dan membutuhkan daya dukung yang besar.

Terkait dengan isu kemiskinan dan pengangguran ini, setidaknya ada beberapa substansi yang akan menjadi fokus perhatian isu ini, diantaranya: meningkatkan keterampilan dan kemampuan wirausaha berbasis lokal, baik desa maupun komunitas; membangun Balai Latihan Kerja dan balai latihan kerja komunitas; membuka akses modal, sarana prasarana dan pasar bagi pelaku usaha kecil dan menengah; meningkatkan infrastruktur perdesaan; melindungi dan memfasilitasi ekonomi sektor primer (khususnya pertanian); meningkatkan jaminan pendidikan dan kesehatan untuk warga miskin; dan membuat kebijakan yang inklusif guna menjamin terpenuhinya hak-hak kelompok rentan dan marginal.



c. Kualitas Sumber Daya Manusia dan nilai-nilai kehidupan masyarakat

Isu Sumber Daya Manusia (SDM) dan Nilai-nilai Kehidupan Masyarakat merupakan isu yang bersifat lintas sektor/bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, lingkungan, ketakwaan, hingga budaya. Ada banyak tugas berat Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk menyelesaikan tantangan yang ada di bidang ini, mengingat isu ini terkait erat dengan *human ware* yang dalam hal ini adalah manusianya serta *soft ware* yang berarti nilai-nilainya, sehingga prosesnya pun dimulai dari membekali dengan pengetahuan, hingga menata sikap dan perilaku.

Modal dasarnya adalah budaya dan agama yang tumbuh kuat di masyarakat selama ini, sehingga dapat dijadikan pegangan dalam berperilaku di lingkungan sosial, maupun dalam kaitannya dengan ibadah rutin masyarakat. Artinya, pendekatan yang dipilih dalam membangun diskursus pada isu ini harus dengan pendekatan spasial dan sektoral. **Pertama**, pendekatan spasial mengarah pada pemberdayaan komunitas dan berbasis wilayah, dengan menggerakkan seluruh sumber daya yang ada di lokal, baik SDM, modal sosial, keuangan, infrastruktur pendukung serta sumber daya alam yang dimiliki. **Kedua**, pendekatan sektoral mengarah pada model pendekatan berbasis isu sektor, seperti kebudayaan, kesehatan, keagamaan, pendidikan dan lain-lain sesuai dengan konteks yang sedang dihadapi.

Pada isu ini, ada upaya melakukan internalisasi nilai-nilai kebaikan ke dalam masyarakat sehingga tercipta relasi yang harmonis, toleransi dan saling menghormati, kebiasaan menjaga kebersihan lingkungan, menciptakan lingkungan yang kondusif, aman dan tentram, serta menciptakan SDM yang berkualitas.

d. Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon dapat diukur dari perubahan PDRB tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Dari perubahan PDRB tersebut, terjadi peningkatan PDRB Atas Dasar Harga



Berlaku (ADHB) sebesar 9,73% dari angka 35,752,663.3 juta rupiah tahun 2015 menjadi 38,882,897.2 juta rupiah pada tahun 2016. Selain itu, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) yang juga merupakan barometer pertumbuhan ekonomi secara riil pada Tahun 2014 mencapai 27,596,254.8 juta rupiah atau meningkat sebesar 4,90% dari Tahun 2015 sebesar 29,148,228.9 juta rupiah. Dan nilai PDRB Kabupaten Cirebon tahun 2017 mencapai 30 ribu 620, 90 miliar rupiah atau naik sebesar 11 ribu 326, 83 miliar rupiah dari 29 ribu 149, 23 miliar rupiah pada tahun 2016. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2017, terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,05 persen.

Ada dinamika positif dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon yang penting untuk diapresiasi dan terus didorong untuk bergerak ke arah yang positif, termasuk menyangkut pemerataan ekonominya.

Akan tetapi yang juga harus diperhatikan adalah terkait pertumbuhan penduduk. Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 2000, 2010 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Cirebon pada kurun waktu 2000-2010 adalah 1,40 persen per tahun. Sementara pada tahun 2010-2016 pertumbuhan penduduknya adalah sekitar 0,79 persen per tahun. Pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut, oleh banyak pihak dianggap sebagai suatu hal yang merisaukan apalagi bila tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tapi tidak merata juga berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial, terutama bila tidak diimbangi dengan penambahan lapangan kerja. Dengan kata lain apabila pertumbuhan penduduk lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan ekonomi maka pertumbuhan penduduk akan menjadi masalah, terlebih bila terdapat kesenjangan pendapatan yang cukup tinggi. Pertumbuhan penduduk yang positif akan memperluas lahan hunian dan mengurangi lahan usaha bagi penduduk itu sendiri.

Pada tahun 2017 jumlah penduduk Kabupaten Cirebon relatif menurun dari tahun sebelumnya menjadi 2.100.299 jiwa, dengan rincian struktur usia produktif dan tidak produktif terdiri dari penduduk usia muda (0-14 tahun) di Kabupaten Cirebon adalah sekitar 471.342 orang, penduduk usia produktif (15-64 tahun) sekitar 1.520.521 orang, dan



penduduk usia lanjut (65 tahun keatas) sekitar 108.436 orang. Angka beban tanggungan penduduk Kabupaten Cirebon pada tahun 2017 adalah sebesar 38,13 artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban ekonomi sekitar 38 orang usia tidak produktif. Artinya ada peluang positif, dimana pertumbuhan ekonomi terus meningkat tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk, sehingga diharapkan dapat membuka akses yang lebih besar terhadap lapangan pekerjaan dan perbaikan taraf hidup masyarakat.

e. Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan;

Kabupaten Cirebon memiliki 412 desa, dimana setiap desa memiliki kekayaan sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam rangka penguatan pembangunan desa. Desa saat ini memiliki kesempatan untuk merencanakan pembangunan berdasarkan potensi dan permasalahan yang ada di desa, berbekal kewenangan yang dimiliki sebagai mandat yang diberikan oleh UU Desa, didukung dengan keuangan yang memadai dalam rangka menyelenggarakan pembangunan di desa.

Akan tetapi, meski sudah memiliki berbagai peluang tersebut, faktanya tidak banyak desa yang mengalami percepatan dalam proses membangun, dan alasannya pun beragam, mulai dari pengetahuan yang terbatas, komitmen politik yang rendah hingga enggan bergeser dari kebiasaan lama dalam proses perencanaan penganggaran desa.

Sebagaimana diketahui, bahwa di Kabupaten Cirebon, desa memiliki kekayaan yang luar biasa untuk dapat menopang kehidupan masyarakat, produk yang dihasilkan pun beragam, mulai dari dukungan sektor pertanian, perkebunan, nelayan hingga di sektor budaya dan pariwisata. Banyak desa yang sudah melaju pesat pembangunannya, namun tidak sedikit juga yang tidak banyak melakukan perubahan.

Oleh karenanya, mendorong desa untuk mengembangkan potensinya penting menjadi prioritas dalam pembangunan daerah, dimana sesuai dengan perannya, Kabupaten memiliki tugas melakukan pembinaan dan pengawasan. Selain itu, ke depan, Pemerintah Kabupaten memiliki



komitmen juga untuk melakukan penataan dan pengembangan kawasan perdesaan sehingga terjadi sinergi pembangunan berbasis kawasan.

Pendekatan yang dapat diambil dalam pembangunan desa dan kawasan perdesaan ini melalui Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL). PEL mensyaratkan adanya proses yang demokratis dan inklusif dalam pengelolaan sumber daya lokal termasuk dengan memperkuat kemitraan antar aktor strategis, guna mencapai tujuan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Melalui pendekatan PEL, diharapkan dapat berkontribusi pada penyelesaian persoalan kemiskinan dan pengangguran yang sampai saat ini masih menjadi beban berat Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Selain daripada itu perlu didorong agar pemerintahan desa mau ikut bertanggung jawab dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pembangunan sektoral sehingga beban Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam menyelesaikan masalah-masalah pembangunan dapat dibagi dan didistribusikan ke seluruh desa sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya.

f. Penyediaan dan Kemantapan Infrastruktur Wilayah

Salah satu indikator mengukur kemajuan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah ketersediaan infrastruktur yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan aktifitas ekonomi. Secara kewilayahan, infrastruktur wilayah memiliki peran strategis dalam peningkatan struktur perwilayahan, mendukung distribusi barang, jasa dan mobilitas orang. Untuk mendukung peran tersebut, infrastruktur memerlukan pengembangan sistem jaringan prasarana jalan dan jembatan yang diarahkan pada lima Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Cirebon yaitu PKL Sumber, PKL Ciledug, PKL Lemahabang, PKL Palimanan dan PKL Arjawinangun.

Infrastruktur wilayah meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air, irigasi, listrik, telepon dan sarana lain seperti sarana pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Kebutuhan infrastruktur wilayah tersebut



terkait dengan fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, dimana dengan kondisi infrastruktur wilayah yang baik dan mantap maka dapat menjadi faktor penarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Cirebon.

Dalam pemenuhan kebutuhan penyediaan dan kemantapan infrastruktur wilayah ini, Pemerintah Kabupaten akan bersinergi dengan Desa yang memiliki kewenangan dan keuangan yang salah satu tugasnya juga melaksanakan pembangunan. Infrastruktur yang memang menjadi wilayah kewenangan desa, akan dipenuhi oleh desa sesuai dengan procedure perencanaan dan penganggaran desa. Sedangkan yang berada di wilayah kewenangan kabupaten, maka akan dibangun oleh Pemerintah Kabupaten.

- a. Kemantapan jembatan dan jalan meliputi jalan kabupaten dan poros desa terutama jalan-jalan penghubung ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ;
- b. Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar meliputi perumahan, sanitasi, dan listrik;
- c. Keterpaduan pembangunan bidang keciptakaryaan meliputi sanitasi, penataan kawasan kumuh, penataan dan pengembangan bangunan dan lingkungan permukiman;
- d. Mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal dan/atau di perbatasan;
- e. Penataan fasilitas sosial dan fasilitas umum meliputi jalan pemukiman, taman, tempat ibadah, dan ruang terbuka hijau;
- f. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni dan terjangkau;
- g. Sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi meliputi saluran pembuangan air limbah domestic, sampah dan pengolahannya terutama sarana TPS dan TPA sekaligus pengembangan manajemen pengelolaan sampah berbasis masyarakat, dan jamban;
- h. Pemeliharaan irigasi teknis dan setengah teknis dengan manajemen sumber daya air berbasis data hidrologis dan timbangan keragaan pengairan;
- i. Prasarana telekomunikasi dan informasi



Selebihnya, yang terpenting dalam penyediaan dan pembangunan infrastruktur ini adalah aspek pemerataan. Daerah pinggiran yang selama ini seringkali termarginalkan, ke depan justru harus menjadi prioritas, sehingga desa-desa pinggiran dapat melakukan percepatan pembangunan.

g. Keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat

Rasa aman dan nyaman masyarakat serta ketentraman sangat ditentukan oleh seberapa besar kemampuan negara/pemerintah menegakkan peraturan-peraturan daerah termasuk peraturan kepala daerah sebagai upaya untuk mengatur dan melindungi rakyatnya. Rasa aman yang dapat diciptakan akan menimbulkan rasa tentram dalam lingkungan kemasyarakatan. Saat rasa aman, nyaman dan tentram itu tidak dapat diciptakan maka akan menurunkan indeks rasa aman dan kenyamanan masyarakat yang pada akhirnya akan mempengaruhi indeks kebahagiaan masyarakatnya.

Kabupaten Cirebon masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup besar terkait menciptakan rasa aman dan nyaman warga masyarakat sekabupaten Cirebon. Pelanggaran pemanfaatan trotoar dan sempadan jalan sebagai area berdagang oleh pedagang kaki lima serasa masalah yang telah mengakar dan berakar seolah tanpa solusi.

Kabupaten Cirebon memiliki citra positif sebagai kota wali, akan tetapi kawasan atau daerah rawan penyakit masyarakat berkembang sangat pesat terutama di sepanjang daerah pantura Jawa. Kenyataan ini cukup memberikan kerassahan terhadap masyarakat yang bermukim di Kabupaten Cirebon, karena gangguan lingkungan terkait prostitusi, minuman keras dan narkoba masih kerap terjadi di Kabupaten Cirebon.

Maka dari itu untuk mengembalikan citra positif sebagai daerah kota Wali perlu diperkuat dengan penegakan Perda dan perkara, mengoptimalkan cakupan pengawasan terhadap daerah rawan penyakit masyarakat terutama daerah prostitusi, minuman keras dan narkoba.

Perlindungan masyarakat melalui penggalakan siskamling dan swadaya masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan



merupakan upaya nyata dalam peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan.

Dari ilustrasi factor-faktor yang mempengaruhi indeks rasa aman dan nyaman daerah diatas, memberikan gambaran dan tantangan kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam membangun rasa aman, nyaman dan tentram masyarakat. Karena secara hakikat aturan main (hukum) yang dibuat oleh manusia secara prinsip adalah untuk mengatur, memberikan kepastian dan melindungi segenap bangsa Indonesia dari kepastian penegakan hukum sendiri.